



SKRIPSI

**KEBIJAKAN PELAYANAN PENDIDIKAN BAHASA DAERAH
TINGKAT SMP DI KABUPATEN LUWU**

IIN HORRYZHA HATTA

1555045035

**JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA
INDONESIA**

**FAKULTAS BAHASA DAN SASTRA
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

2017

i

SKRIPSI

**KEBIJAKAN PELAYANAN PENDIDIKAN BAHASA DAERAH
TINGKAT SMP DI KABUPATEN LUWU**

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana
Pendidikan Pada Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas
Bahasa dan Sastra
Universtas Negeri Makassar.

OLEH

IIN HORRYZHA HATTA

1555045035

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH
JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA
FAKULTAS BAHASA DAN SASTRA
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

2017

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Iin Horryzha Hatta
2. NIM : 1555045035
3. Tempat/Tanggal Lahir : Batu Merah, 8 Juni 1993
4. Alamat : BTP Blok A No.397
5. Jurusan : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
6. Program Studi : Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah
7. Judul : Kebijakan Pelayanan Pendidikan Bahasa Daerah Tingkat SMP di Kabupaten Luwu

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan karya asli yang bersumber dari ide saya sendiri dan bukan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran sendiri, kecuali yang saya nyatakan sebagai kutipan. Selain, tidak ada sebagian dari skripsi yang telah saya atau orang gunakan sebelumnya untuk memperoleh gelar akademik.

Jika pernyataan di atas terbukti atau dapat dibuktikan sebaliknya, maka saya bersedia menerima sanksi yang ditetapkan oleh Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar atau berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Makassar, 18 Juni 2017

Yang membuat pernyataan,

Iin Horryzhon Hatta
NIM. 1555045035

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : “Kebijakan Pelayanan Pendidikan Bahasa Daerah Tingkat SMP di Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu”

Atas nama mahasiswa :

Nama : Iin Horryzha Hatta
NIM : 1555045035
Program Studi : Pendidikan Guru Bahasa Daerah
Jurusan : Bahasa dan Sastra Indonesia
Fakultas : Bahasa dan Sastra

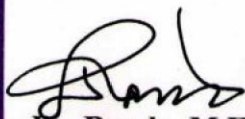
Setelah dikoreksi dan diperbaiki, Skripsi ini dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk dijilid.

Makassar, 22 Agustus 2017

Menyetujui

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Ramly, M.Hum.
NIP. 19590616 198601 1 002



Dr. Sajam, M.Pd.
NIP. 1963628 198903 1 002

Mengetahui,

**Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia
FBS UNM,**



Dr. Muhammad Saleh, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19751231 200003 1 001

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar, dengan SK No.5665/UN36.5.2/EP/2017 pada tanggal 14 Agustus 2017, untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, pada hari Senin 14 Agustus 2017.

Makassar, 22 Agustus 2017




Disahkan:
Dekan Fakultas Bahasa dan Sastra



Dr. H. Syarifuddin Dollah, M.Pd.
NIP.19631231 198803 1 029

Panitia Ujian:

1. Ketua
Dr. H. Syarifuddin Dollah, M.Pd.
2. Sekretaris
Dr. Muhammad Saleh, S.Pd., M.Pd.
3. Pembimbing I
Dr. Ramly, M.Hum.
4. Pembimbing II
Dr. Salam, M.Pd.
5. Penguji I
Hajrah, S.S., M.Pd.
6. Penguji II
Dr. Andi Agussalim AJ., M.Hum.

()
()
()
()
()
()

MOTO

Toddopuli Tamalara

Bersatu Kita Teguh Bercerai Kita Runtuh

Semua yang diciptakan di dunia ini berpasang-pasangan

Dan percayalah pada kekuatan doa

PERSEMBAHAN

Dengan penuh kerendahan hati dan kesadaran diri yang sepenuhnya, saya mempersembahkan karya ini kepada :

Kupersembahkan Terkhusus Untuk Kedua Orang Tuaku *AYAH: A. MIMING DAN IBU: Dra. HJ. NURHALIA*, Yang Telah Sabar Menjaga, Membesarkan, dan Mendidikku Hingga Aku Bisa Jadi Seperti Ini dengan Penuh Kasih Sayang Yang Sangat Berlimpah Tak Ada Kata Terindah Yang Mampu Ku Ucapkan Selain Untaiyan Kalimat "Terima Kasih" Ayah Dan Ibu, Serta Kakak-Kakakku dan Keluargaku Kalian Adalah Semangat *HIDUPKU: A. AFRISAL, S.Pd., A. ASRUL, S.Pd., HJ. DJUHRIA TJUMMA, HURAEDA TJUMMA, S.Sos., ASMIRAH TJUMMA, ST. MUH. SYAHRIR TJUMMA, SH. MUH. SAID TJUMMA* Yang Telah Menjadi Pendorong Semangatku Untuk Aku Meraih Sukses Kelak. Amin ... Tak lupa juga buat teman-temanku *MUH. TASLIM TASWIN, IIN HORRYZHA HATTA, SUEBA RASYID DAN MUH. NUR AQSAR*. Yang telah mendoakan dan membantuku untuk meraih gelar sarjana. Sekali lagi saya ucapkan banyak "Terima Kasih".

ABSTRAK

lin Horryzha Hatta, 2017, "Kebijakan Pelayanan Pendidikan Bahasa Daerah Tingkat SMP Di Kabupaten Luwu "Skripsi. Jurusan Bahasa Dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa Dan Sastra, Universitas Negeri Makassar, di bimbing oleh Dr. Ramly, M.Hum sebagai pembimbing 1 dan Dr. Salam, M.Pd sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana pelaksanaan pelayanan pendidikan Bahasa Daerah di Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan, serta untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan pendidikan Bahasa Daerah di Kabupaten Luwu. Jenis penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif. Dasar penelitian yang digunakan adalah metode survey. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik wawancara, dan kuesioner. Data dikumpulkan dari berbagai sumber hingga didapatkan data yang cukup. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif, dibantu dengan tabel frekuensi, sesuai jumlah variabel yang dijadikan indikator dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan pendidikan Bahasa Daerah di Kabupaten Luwu, masih kurang atau belum maksimal. Hal ini didapatkan dari hasil olahan data kuesioner yang rata-rata skor berada dalam kategori sedang. Saat wawancara dengan informan, serta pengamatan secara langsung di lokasi penelitian. Sedangkan adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan pendidikan Bahasa Daerah di Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan ialah faktor ketersediaan tenaga didik (guru) pemberi pelayanan, faktor sarana sebagai tempat pelaksanaan pelayanan, faktor anggaran atau biaya yang digunakan, pelaksanaan kurikulum, faktor partisipasi masyarakat dan dukungan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan.

Kata kunci: Kebijakan, Pelaksanaan, pelayanan, Pendidikan, Bahasa Daerah.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. atas limpahan rahmat, hidayah, dan kasih sayang-Nya, sehingga skripsi yang berjudul “Kebijakan Pelayanan Pendidikan Bahasa Daerah Tingkat SMP di Kabupaten Luwu” dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw. sebagai rahmatan lil alamin.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) pada Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, do`a, bimbingan dari berbagai pihak, kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Dr. Ramly, M.Hum. sebagai pembimbing I dan Dr. Salam, M.Pd. sebagai pembimbing II yang telah sabar, tekun, tulus, dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saransaran yang berharga kepada penulis selama menyusun skripsi.

Ucapan yang sama kepada Hajarrah, S.S., M.Pd. sebagai penguji I dan Dr. Andi Agussalim AJ., M.Hum.. sebagai penguji II karena telah memberikan kritik dan saran yang membangun. Ucapan terimakasih kepada Dr. Muhammad Saleh, S.Pd.,M.Pd. sebagai Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dan

Dr. Hj. Kembong Daeng, M.Hum. sebagai Ketua Prodi Bahasa dan Sastra Daerah serta kepada seluruh staf dan dosen pada Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia yang telah membekali penulis sebagai pengetahuan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada Kepala SMP Negeri 3 Lamasi, Amiruddin, S.Pd yang telah memberikan izin melakukan penelitian disekolah tersebut.

Ucapan teristimewa penulis ucapkan kepada kedua orang tua tercinta yang telah mengasuh dan mendidik dengan penuh ketulusan sejak kecil hingga dewasa, juga kepada kelima saudara, dan seluruh keluarga yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik moral maupun material sampai penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin!

Makassar, Juli 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR	9
A. Tinjauan Pustaka.....	9
B. Kerangka Pikir	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Lokasi Penelitian	34
C. Data dan Sumber Data	37
D. Instrumen Penelitian.....	37
E. Tehnik Pengumpulan Data.....	38
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	40

A. Hasil dan Analisis Data.....	40
B. Pembahasan.....	48
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN.....	87

DAFTAR TABEL

TABEL	HALAMAN
1. Tempat Tinggal Responden (Masyarakat) Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu.....	40
2. Tempat Tinggal Responden (Aparat) Kecamatan Lamasi Timur dan Kabupaten Luwu	41
3. Jenis Kelamin Responden (Masyarakat)	42
4. Jenis Kelamin Responden (Aparat).....	43
5. Usia Responden (Masyarakat)	44
6. Usia Responden (Aparat).....	45
7. Pekerjaan.....	46
8. Pendidikan Terakhir Responden (Masyarakat).....	47
9. Pendidikan Terakhir Responden (Aparat).....	48
10. Data Guru Bahasa Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kecamatan Lamasi Timur.....	63
11. Tanggapan Masyarakat Mengenai Guru Telah Mendidik Murid Dengan Baik.....	65
12. Jumlah Sekolah dan Siswa di Kecamatan Lamasi Timur Tahun 2017	

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR	HALAMAN
1. Kerangka Pikir Penelitian	33
2. Diagram Jumlah Penduduk Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan	36

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang saat ini menganut asas desentralisasi yang merupakan proses perkembangan pemerintahan ditentukan bagaimana jalannya pemerintahan pada tingkatan daerah. Asas desentralisasi yang kemudian melahirkan suatu konsep dengan apa yang dinamakan otonomi daerah adalah satu bukti bagaimana proses perkembangan pemerintahan yang lebih demokratis mulai diwujudkan di negara Indonesia. Konsep otonomi yang kemudian dikerucutkan lagi menjadi otonomi daerah yang memberikan legalitas kepada daerah dalam proses pengelolaan daerah saat ini, merupakan suatu hal yang menjadi identitas bagi negara Indonesia. Dengan melalui proses yang panjang akhirnya penerapan konsep otonomi daerah sedikit demi sedikit mulai diaplikasikan di beberapa daerah, yang notabene dianggap mampu untuk melakukan konsep otonomi daerah. Tidak dipungkiri cerita tentang bagaimana sejarah perkembangan pemerintahan khususnya, dalam perkembangan pemerintahan daerah telah melalui beberapa tahap. Di mana dapat dilihat dari pemberlakuan tentang Undang-undang pemerintahan daerah (Desentralisasi wet 1903), hingga kini amandemen baru tentang otonomi daerah yakni Undang-undang N0.12 Tahun 2008. Dari penggunaan asas sentralisasi hingga kini ke asas desentralisasi, yang kesemuanya adalah hal konkrit yang terjadi dalam sejarah perkembangan pemerintahan Indonesia.

Konsep otonomi daerah yang didasarkan atas asas desentralisasi secara umum ialah bagaimana daerah diberikan kewenangan dalam mengelola segala sumber daya dan potensi yang ada pada daerah itu sendiri. Hingga daerah mampu untuk hidup mandiri tanpa ketergantungan penuh pada pemerintahan pusat. Kewenangan yang diberikan untuk mengelola dan mengatur segala sumber dan potensi daerah, diimplemetasikan ke dalam beberapa poin pokok yang kemudian menjadi hak dan kewajiban daerah. Sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang pemerintahan daerah. Beberapa hak dan kewajiban daerah seperti yang diatur dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah merupakan variabel yang penting, hal ini dikarenakan peranannya dalam keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.

Konsep otonomi daerah juga diberikan kepada pengambil keputusan pada daerah, untuk membina dan mengatur otoritas dalam peningkatan daerah yaitu adanya suatu Kebijakan. Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi atau anggota masyarakat dalam berperilaku Dunn, (2000). Kebijakan diperoleh melalui suatu proses pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan (*policy making*) adalah terlihat sebagai sejumlah proses dari semua bagian dan berhubungan kepada sistem sosial dalam membuat sasaran sistem. Proses pembuatan keputusan memperhatikan faktor lingkungan eksternal, input (masukan), proses (transformasi), out put (keluaran), dan *feedback* (umpan balik) dari lingkungan kepada pembuat kebijakan.

Pembuatan suatu Kebijakan dimaksudkan bagaimana pemerintah daerah dalam otonomi daerah memiliki tanggung jawab dalam memberikan pelayanan. Sebagaimana diketahui bahwa pelayanan merupakan hal yang tak dapat dipisahkan dalam kehidupan bernegara. Pelayanan kemudian menjadi faktor penting bagi pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Pelayanan seperti yang dijelaskan Norman, Pelayanan pada dasarnya adalah kegiatan yang ditawarkan oleh organisasi atau perorangan kepada konsumen (costumer yang dilayani), yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki. (Sutopo. 2009: 8). Sedangkan dalam keputusan menteri negara pemberdayaan aparatur negara No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 dijelaskan bahwa pelayanan public yaitu segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan public, sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan perundang-undangan.

Dari penjelasan sebelumnya, terlihat betapa pelayanan merupakan aspek penting yang harus diberikan kepada masyarakat. Pelaksanaan dari hak dan kewajiban daerah pada pasal 21 dan 22 undang-undang pemerintahan daerah No. 12 tahun 2008 pada dasarnya, mendeskripsikan tugas pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai konsekwensi dari pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri. Hal ini dikarenakan bahwa poin-poin yang menjadi hak dan kewajiban daerah menggambarkan bagaimana pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan di berbagai bidang yang meliputi aspek-aspek kehidupan masyarakat. misalnya saja bagaimana pemerintah daerah berkewajiban dalam memberikan pelayanan di bidang pendidikan yang menyangkut tentang pelayanan kepada masyarakat.

Dari berbagai hal yang menyangkut tentang pelaksanaan pelayanan di bidang Pendidikan yang ada dalam hak dan kewajiban daerah ada poin-poin penting yang kemudian menjadi tugas pemerintah. Bukan hanya daerah tapi pusat dan provinsi dalam melaksanakan tugas ini dalam bentuk pelayanan umum. Poin penting yang dimaksud ialah bagaimana pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan di bidang pendidikan yang merupakan kebutuhan dasar bagi setiap masyarakat. Pentingnya pelayanan dasar di bidang pendidikan dikarenakan aspek pendidikan adalah kebutuhan yang wajib yang harus diberikan pemerintah daerah dalam rangka mensejahterakan kehidupan masyarakatnya. Jika hal ini tidak diperhatikan oleh pemerintah daerah adalah suatu kegagalan bagi pemerintah daerah sendiri dalam rangka membangun kualitas sumber daya manusia masyarakatnya.

Pelayanan dasar bidang pendidikan tidak kalah pentingnya dalam membangun kualitas hidup masyarakat. Hal inilah yang kemudian dijadikan tolak ukur dalam mengukur indeks pembangunan manusia (IPM). Pelayanan dasar di bidang pendidikan adalah salah satu aspek yang penting dalam era otonomi daerah. Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU 1945 bahwa salah satu tujuan bangsa Indonesia ialah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Dengan demikian keharusan inilah yang menjadi tugas bagi pemerintah daerah Kabupaten Luwu dalam melaksanakan konsep otonomi daerah khususnya, dalam pelaksanaan pelayanan dasar di bidang pendidikan Bahasa Daerah. Yang tentunya harus dengan pelaksanaan yang baik, yang menjadi masalah tentunya adalah pelaksanaan hak dan kewajiban daerah dalam rangka otonomi daerah untuk melaksanakan pelayanan khususnya di bidang pendidikan ini .

Menurut penulis banyak hal yang mungkin menjadi masalah dalam proses pelaksanaannya, misalnya dari pelaksanaan pelayanan dasar di bidang pendidikan oleh para aparatur atau pegawai-pegawai daerah Kabupaten Luwu dan Kecamatan Lamasi yang lokasinya dijadikan sebagai subjek dalam penelitian dan sebagai pelaksana penuh dari pelaksana pelayanan itu sendiri.

Dalam proses Kebijakan yang diangkat dalam perumusan ini merupakan penjabaran dari rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, terutama Mengamanatkan dalam Kebijakan Pendidikan. Pada landasan teori ini akan dibahas mengenai hal-hal yang relevan dengan permasalahan penelitian sehingga berfungsi sebagai masukan dan acuan dalam menganalisa terhadap data yang diperoleh di lapangan. Sehingga Penulis mengangkat maksud dalam Kebijakan yang mana diartikan sebagai suatu tindakan yang mempunyai dan mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Luwu diharapkan mampu memberikan suatu Penjelasan apa yang akan dibahas dalam mencapai tujuan terutama Kebijakan dalam Pengembangan Pendidikan Bahasa Daerah yang Penulis khususkan di SMP Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu.

Berdasarkan atas pemikiran-pemikiran tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian, dengan judul "*Kebijakan Pelayanan Pendidikan Bahasa Daerah Tingkat SMP di Kabupaten Luwu*", yang diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi daerah-daerah yang melaksanakan pelayanan dasar dalam bidang pendidikan. Di era otonomi daerah saat ini khususnya bagi Kabupaten Luwu dalam merumuskan atau mengagendakan program-program kerja dan langkah-langkah strategis, termasuk Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan Khususnya Bahasa Daerah yang dalam hal ini hampir punah. Untuk dijadikan sebagai bahan ajar terutama pada tingkat Sekolah Menengah Pertama, sehingga memerlukan penanganan serius dan bagaimana mengembangkan Budaya Bangsa dan kecintaan terhadap Bahasa. Dikarenakan bahasa Daerah diartikan sebagai identitas suatu Bangsa. Sehingga dalam hal ini, diperlukan upaya dalam meningkatkan dan menyempurnakan aspek-aspek atau bidang-bidang yang berpengaruh dalam proses keberhasilan pelaksanaan pelayanan, khususnya di bidang pendidikan Bahasa Daerah di Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu.

Adapun beberapa bukti bahwa penelitian tentang kebijakan pelayanan adalah penelitian yang dilakukan oleh Rahmانيar pada tahun 2011 Dengan judul Implementasi kebijakan kurikulum muatan lokal (studi kasus di SLTP NEG.2 PARE-PARE) penelitian tersebut membuktikan bahwa penelitian tentang kebijakan pelayan pendidikan bahasa daerah selalu dilakukan dalam pembelajaran.

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan beberapa cakupan masalah dari latar belakang yang menyangkut permasalahan, tentang bagaimana dan langkah-langkah dalam kebijakan terhadap Pelayanan Pendidikan Bahasa Daerah di Tingkat Sekolah Menengah Pertama Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu. Maka penulis merumuskan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan pelayanan pendidikan bahasa daerah tingkat SMP di Kabupaten Luwu ?
2. Apakah Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pelayanan pendidikan bahasa daerah di tingkat SMP Kabupaten Luwu ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui kebijakan pelayanan pendidikan bahasa daerah di tingkat SMP Kabupaten Luwu.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kebijakan pelayanan pendidikan bahasa daerah di tingkat SMP Kabupaten Luwu.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk :

1. Diharapkan memberikan sumbangan pengetahuan bagi pemerintah daerah dalam kebijakan pelayanan pendidikan bahasa daerah di tingkat SMP Kabupaten Luwu

2. Diharapkan memberikan gambaran umum bagi masyarakat dan pihakpihak yang terkait, tentang pelaksanaan pendidikan Bahasa Daerah di Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu.
3. Dapat menjadi sumbangan referensi bagi para pihak yang respect terhadap perkembangan pelaksanaan pendidikan di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

Dalam sistem ketatanegaraan otonomi daerah, pelestarian bahasa daerah tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab pemerintah daerah, dengan tetap mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009, Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan. Sehingga, regulasi ini diterjemahkan ke dalam peraturan daerah (Perda) sebagai wujud apresiasi Pemda atas pelestarian budaya daerah. Selain itu, Perda tersebut dapat menjadi landasan hukum dan pedoman bagi pemerintah untuk melakukan upaya pembinaan dan pengembangan bahasa daerah. Hal ini didasari adanya kesadaran akan besarnya potensi dan keunikan kebudayaan (salah satunya bahasa) yang dimiliki oleh masing-masing daerah, serta keprihatinan atas kelestarian bahasa daerah yang mulai terkikis oleh pengaruh globalisasi, serta kecenderungan penurunan penggunaan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan pergaulan dan keluarga yang semakin jarang dijumpai.

Konseptual Kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tata pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Implementasi terhadap kebijakan dimaksud mengarah bagaimana meningkatkan mutu pendidikan terhadap Bahasa Daerah.

Dalam hal pelaksanaan pelayanan oleh pemerintah merupakan unsur wajib bagi daerah yang telah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Secara teoritis otonomi daerah akan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, karena dengan adanya otonomi daerah dapat diciptakan adanya kesetaraan posisi tawar antara pemerintah daerah sebagai penyelenggara jasa pelayanan dengan masyarakat sebagai pengguna jasa.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang hal-hal yang mengenai konsep kebijakan dan pelayanan terhadap pendidikan bahasa daerah, maka dalam tinjauan pustaka ini penulis akan menguraikan beberapa penjelasan dari beberapa sumber maupun data-data pendukung yang menyangkut beberapa hal yang menyangkut penelitian yang akan dilakukan yakni sebagai berikut :

1. Kebijakan

a. Pengertian Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak . Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan

dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit.

Hanida (2009) mengemukakan bahwa pendapat beberapa defenisi yang dibuat oleh pendapat ahli untuk menjelaskan arti kebijakan. Diantaranya Thomas Dye yang menyebutkan kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*what ever government chooses to do or not to do*). Easton menyebutkan kebijakan pemerintah sebagai “ kekuasaan mengalokasi nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan”. Hal ini mengandung konotasi tentang kewenangan pemerintah yang meliputi keseluruhan kehidupan masyarakat. Tidak ada suatu organisasi lain yang wewenangnya dapat mencakup seluruh masyarakat kecuali pemerintah. Sementara Lasswell dan Kaplan yang melihat kebijakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, menyebutkan kebijakan sebagai program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai dan praktek (*a projected program of goals, values and practices*).

b. Dasar Penentuan kebijakan

Indonesia merupakan Negara menerapkan prinsip demokratis. Oleh karena itu pemerintah maupun pimpinan institusi yang berwenang memutuskan suatu kebijakan berdasarkan hasil musyawarah (mufakat). Anderson (dalam Hanida, 2009) memberikan defenisi kebijakan public sebagai kebijakankebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah, yang mengimplikasikan sebagai berikut:

- 1) Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan.

- 2) Kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah.
- 3) Kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan.
- 4) Kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tersebut atau bersifat negative dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.
- 5) Kebijakan pemerintah setidak-tidaknya dalam arti yang positif di dasarkan pada peraturan perundang-undangan yang tidak bersifat mengikat dan memaksa.

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengambilan Kebijakan

Proses kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung, yang di atur menurut urutan waktu (penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implemementasi kebijakan dan penilaian kebijakan). Kebijakan dapat menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan pada satu, beberapa dan seluruh tahap dari proses pembuatan kebijakan, tergantung pada tipe masalah yang dihadapi klien yang dibantunya.

Menurut Trust (dalam Hanida, 2009) yang berjudul Penilaian Kapasitas

(Capacity Assessment) untuk mempengaruhi kebijakan adalah adanya suatu Kapasitas Kelembagaan. Adapun tingkatan atau level kapasitas yang mempengaruhi pengambilan suatu kebijakan adalah :

- 1) Individual level, yang terdiri dari pengetahuan, keterampilan, kompetensi, etika dan etos.
- 2) Institutional level, yaitu struktur organisasi, jenjang kendali, budaya organisasi dan penilaian kinerja.
- 3) Sistem level, yaitu hukum atau peraturan dan kebijakan publik.

2. Pelayanan

a. Pengertian Pelayanan

Berkaitan dengan Pelayanan, ada dua istilah yang perlu diketahui, yaitu melayani dan pelayanan. Pengertian melayani adalah “membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan seseorang”. Sedangkan pengertian pelayanan adalah “usaha melayani kebutuhan orang lain” (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1996).

Definisi pelayanan menurut *Ivancevich, Lorenzi, Skinner dan Crosby* “Pelayanan adalah produk-produk yang tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang melibatkan usaha-usaha manusia dan menggunakan peralatan”. (Ratminto & Winarsih A.s, 2006:2).

Definisi lain menurut *Gronross* (Dalam Feriyal Akbar Muhammad 2010) bahwa:

“Pelayanan adalah suatu aktifitas atau serangkaian aktifitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang

disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen/pelanggan”.

Pelayanan seperti yang dijelaskan *Normann*, Pelayanan pada dasarnya adalah kegiatan yang ditawarkan oleh organisasi atau perorangan kepada konsumen (customer/yang dilayani), yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki. Sutopo, (2009: 8). Oleh *normann* dijelaskan karakteristik tentang pelayanan, yakni :

- 1) Pelayanan bersifat tidak dapat diraba, pelayanan sangat berlawanan sifatnya dengan barang jadi.
- 2) Pelayanan itu kenyataannya terdiri dari tindakan nyata dan merupakan pengaruh yang sifatnya adalah tindakan social.
- 3) Produksi dan konsumsi dari pelayanan tidak dapat dipisahkan secara nyata, karena pada umumnya kejadiannya bersamaan dan terjadi di tempat yang sama.

Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara nomor 81 tahun 1993 Jo.

Kepmen PAN nomor 63 tahun 2003 mendefinisikan pelayanan umum

sebagai :

“Segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah dalam bentuk barang dan jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan”. (Keputusan MENPAN Nomor 63/2003).

Lebih lanjut dijelaskan dalam Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 dijelaskan bahwa pelayanan publik yaitu segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan

publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan perundang-undangan.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelayanan pada dasarnya ialah segala usaha pemenuhan kebutuhan manusia secara khusus ataupun masyarakat secara umum, dalam bentuk barang ataupun jasa, sehingga pelanggan/masyarakat dapat terpuaskan sesuai dengan prosedur yang ada. Jika dikontekskan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan adalah segala bentuk jasa layanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik, yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah. Dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundangundangan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang pedoman penyelenggaraan SPM, Secara umum dijelaskan Pelayanan dasar merupakan jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.

Dari berbagai penjelasan yang ada, maka penulis menarik sebuah kesimpulan bahwa, pada dasarnya pelayanan dasar diartikan sebagai pelayanan wajib yang harus diberikan oleh pemerintah baik itu pemerintah yang ada di pusat maupun yang ada di daerah. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti kebutuhan di bidang Kesehatan dan Pendidikan.

b. Faktor Pendukung Pelayanan

Sesungguhnya yang menjadi produk dari organisasi pemerintahan adalah pelayanan masyarakat (publik service). Pelayanan tersebut diberikan untuk memenuhi hak masyarakat, baik itu merupakan layanan civil maupun layanan publik. Artinya kegiatan pelayanan pada dasarnya menyangkut pemenuhan suatu hak. Ia melekat pada setiap orang, baik secara pribadi maupun berkelompok (organisasi), dan dilakukan secara universal.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Moenir (1998:41) bahwa :

“Hak atas pelayanan itu sifatnya sudah universal, berlaku terhadap siapa saja yang berkepentingan atas hak itu, dan oleh organisasi apa pun juga yang tugasnya menyelenggarakan pelayanan.”

Tugas pemerintah adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat, menurut Thoha (1995:4) bahwa :

“Tugas pelayan lebih menekankan kepada mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik, mempersingkat waktu proses pelaksanaan urusan publik. Sedangkan tugas mengatur lebih menekankan kepada kekuasaan atau power yang melekat pada posisi jabatan birokrasi”.

Pelayanan umum akan dapat terlaksana dengan baik dan memuaskan apabila didukung oleh beberapa faktor antara lain: kesadaran para pejabat pimpinan dan pelaksana, adanya aturan yang memadai, organisasi dengan mekanisme sistem yang dinamis, pendapatan pegawai yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, kemampuan dan ketrampilan yang sesuai dengan tugas/pekerjaan yang dipertanggung-jawabkan, dan tersedianya sarana pelayanan sesuai dengan jenis dan bentuk tugas/pekerjaan pelayanan.

Keenam faktor pendukung itu mempunyai bobot sama, kecuali faktor kesadaran yang berbobot lebih tinggi dari yang lain. Kelemahan salah satu faktor

akan berakibat pada hasil pelaksanaan tugas/pekerjaan pelayanan yang tidak memenuhi keinginan semua pihak, baik manajemen maupun pihak yang dilayani.

Aturan dalam organisasi mutlak keberadaannya agar organisasi dan pekerjaan dapat berjalan teratur dan terarah. Untuk itu penting diperhatikan tentang kewenangan membuat peraturan dalam organisasi. Kewenangan mempunyai kaitan dengan keabsahan dan kekuatan hukum atas peraturan, karena dalam peraturan senantiasa ada sanksi terhadap pelanggaran. Kewenangan dalam pembuatan peraturan terletak pada manajemen pada segala tingkat sesuai dengan bidang tugasnya. Di samping kewenangan juga perlu diperhatikan oleh si pembuat peraturan, agar peraturan itu dapat diterapkan tanpa kesulitan/rintangan, mudah dipahami dan dipatuhi. Selanjutnya agar peraturan dapat mencapai apa yang dimaksud, maka ia harus dipahami oleh semua orang yang berkepentingan terutama orang-orang yang bertugas dalam bidang yang diatur itu dengan disertai disiplin yang tinggi.

Faktor pendukung berikutnya adalah kemampuan-keterampilan para pegawai dalam melaksanakan tugas/pekerjaan, baik mereka yang termasuk dalam golongan pimpinan (manajemen) maupun petugas/pekerja. Bagi manajemen ada 3 kemampuan yang harus dimiliki (managerial skill), agar dapat melaksanakan tugas selaku manajer yang berhasil yaitu kemampuan teknis (technical skill), kemampuan bersifat manusiawi (human skill) dan kemampuan konseptual (conceptual skill).

Tidak kalah penting sebagai faktor pendukung pelayanan adalah sarana yang ada untuk melaksanakan tugas/pekerjaan layanan. Sarana terbagi atas dua macam, yaitu sarana kerja dan fasilitas. Sarana kerja meliputi peralatan,

perlengkapan dan alat bantu. Sedangkan fasilitas meliputi gedung dengan segala kelengkapannya, fasilitas komunikasi dan kemudahan lain.

3. Pendidikan

a. Pengertian Pendidikan

Dengan perkembangan zaman di dunia pendidikan yang terus berubah dengan signifikan sehingga banyak merubah pola pikir pendidik, dari pola pikir yang awam dan kaku menjadi lebih moderen. Hal tersebut sangat berpengaruh dalam kemajuan pendidikan di Indonesia. Menyikapi hal tersebut pakar-pakar pendidikan mengkritisi dengan cara mengungkapkan konsep dan teori pendidikan yang sebenarnya untuk mencapai tujuan pendidikan yang sesungguhnya. Kamus Bahasa Indonesia (1996:232). Pendidikan berasal dari kata " didik" , Lalu kata ini mendapat awalan kata " me" sehingga menjadi " mendidik" artinya memelihara dan memberi latihan. Dalam memelihara dan memberi latihan diperlukan adanya ajaran, tuntutan dan pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Menurut bahasa Yunani : pendidikan berasal dari kata " Pedagogi" yaitu kata " paid" artinya " anak" sedangkan " agogos" yang artinya membimbing " sehingga " pedagogi" dapat di artikan sebagai " ilmu dan seni mengajar anak" . Menurut UU No.20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Wikipedia (Edisi 2019/10/26) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Dari pernyataan diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran atau pelatihan agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya supaya memiliki kekuatan spiritual keagamaan, emosional, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

b. Faktor Pendukung Sistem Pendidikan

Perubahan besar politik pasca reformasi yaitu otonomi daerah, sedikit banyak mengubah wajah pendidikan Indonesia. Sistem Pendidikan nasional yang sebelumnya lebih ke *top down policy*, yang terkesan birokratik, sekarang ditarik kearah yang lebih humanis. Masyarakat dilibatkan dalam sistem pendidikan. Muncullah Kebijakan manajemen berbasis sekolah (MBS) sebagai respon dari kompleksitas social dan pendidikan. Salah satu terobosan dalam kebijakan pendidikan nasional adalah dengan dibuatnya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003. Dengan keberadaan Undang-Undang ini, Indonesia memiliki peta dan arah untuk pencapaian tujuan pendidikan yang termaktub dalam pembukaan konstitusi. Dengan kata lain, negeri ini memiliki landasan yuridis formal untuk mengukur pencapaian tujuan pendidikan nasional tersebut.

Terobosan berikutnya dalam pendidikan nasional adalah dengan dibuatnya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Dijabarkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Guru. Kemunculan Undang-undang yang mengatur tentang Guru dan Dosen ini berarti pendidik diakui profesinya secara hukum, setelah sekian lama dibiarkan tanpa kekuatan yuridis. Prof. M. Surya dalam berbagai kesempatan mengungkapkan, sebelumnya adanya Undang-undang tentang guru dan dosen ini, bahwa guru dikalahkan oleh binatang langka. Keberadaan binatang langka diakui oleh Negara dengan adanya Undang-undang yang mengatur masalah tersebut. Sedangkan guru dibiarkan tanpa dasar hukum, tidak diakui eksistensinya. Benar-benar pahlawan tanpa tanda jasa.

Terobosan berikutnya dalam dunia pendidikan adalah saat diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang kemudian ditata dalam Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 2013. Standar Nasional pendidikan ini ditujukan untuk menyamakan kualitas minimal pendidikan di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sebagai respons dari tidak meratanya kualitas pendidikan disebabkan sebaran dan jumlah penduduk yang sangat luas. Peraturan Pemerintah mengenai Standar Nasional pendidikan inilah yang mengatur 8 standar yaitu :

- 1) Standar isi
- 2) Standar proses
- 3) Standar Kompetensi lulusan
- 4) Standar pendidik dan tenaga kependidikan

- 5) Standar sarana dan prasarana
- 6) Standar pengelolaan
- 7) Standar pembiayaan
- 8) Standar penilaian pendidikan

Dengan terbitnya PP yang mengatur tentang standar nasional pendidikan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, sehingga tujuan pendidikan nasional yang diamanatkan dalam konstitusi bisa tercapai di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia.

Menyelaraskan dengan perkembangan jaman, globalisasi dan untuk percepatan pembangunan, pemerintah membuat kebijakana MBS. Ciri MBS adalah pelibatan masyarakat dalam pendidikan. Dewan sekolah dibentuk ditingkat meso pendidikan. Komite sekolah didirikan di level mikro pendidikan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan. Pelibatan masyarakat dalam pendidikan untuk mendorong terwujudnya masyarakat sekolah dan masyarakat belajar (*learning community*) sehingga sekolah tidak menjadi menara gading, institusi yang tidak *up to date*, tidak selaras dengan kebutuhan masyarakat.

4. Bahasa

a. Pengertian Bahasa

Bahasa adalah sistem lambang bunyi yg arbitrer, yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Bahasa merupakan ciri khas dari suatu Negara, bahasa juga merupakan alat komunikasi dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan

sosial. Oleh karena itu, bahasa yang digunakan seseorang bisa mencerminkan kepribadian orang tersebut, yang dapat dilihat dari gaya dan tuturan berbahasanya, itulah mengapa bahasa merupakan simbol penting dari suatu negara.

Defenisi bahasa menurut Menurut Gorys Keraf (1997:1), Bahasa adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Sedangkan menurut Fodor 1974 (Dalam Rahmaniar 2011), Bahasa adalah system simbol dan tanda. Yang dimaksud dengan system simbol adalah hubungan simbol dengan makna yang bersifat konvensional. Sedangkan yang dimaksud dengan system tanda adalah bahwa hubungan tanda dan makna bukan konvensional tetapi ditentukan oleh sifat atau ciri tertentu yang dimiliki benda atau situasi yang dimaksud.

Defenisi lain menurut Bolinger (Dalam Rahmaniar 2011), Bahasa memiliki system fonem, yang terbentuk dari *distinctive features* bunyi, system morfem dan sintaksis. Untuk mengungkapkan makna bahasa harus berhubungan dengan dunia luar. Yang dimaksud dengan dunia luar adalah dunia diluar bahasa termasuk dunia dalam diri penutur bahasa. Dunia dalam pengertian seperti ini disebut realita dan menurut Sunaryo (2000:6), Bahasa didalam struktur budaya ternyata memiliki kedudukan, fungsi dan peran ganda yaitu sebagai akar dan produk budaya yang sekaligus berfungsi sebagai sarana berfikir dan sarana pendukung pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bila dilihat dari beberapa definisi dan pengertian mengenai bahasa menurut beberapa ahli diatas, kita bisa melihat bahwa terdapat perbedaan definisi tentang bahasa dimana definisi dari setiap ahli tergantung dengan apa yang ingin

ditekankan oleh setiap tersebut. Namun meskipun terdapat perbedaan, nampaknya disepakati bersama bahwa bahasa adalah alat komunikasi. Dan sebagai alat komunikasi, bahasa mempunyai fungsi-fungsi dan ragam-ragam tertentu.

1.) Prinsip Pengembangan Kurikulum Bahasa

Pengembangan kurikulum dalam hal ini menurut Nana Syaodih Sukmadinata (1988: 167-168) mengemukakan prinsip pengembangan kurikulum dimana pengembangan kurikulum merupakan proses atau kegiatan yang sengaja dan dipikirkan untuk menghasilkan sebuah kurikulum yang berpedoman dalam proses penyelenggaraan pembelajaran oleh Guru di Sekolah yaitu sebagai berikut :

- a) *Prinsip Relevansi*, yaitu kesesuaian antara komponen tujuan, isi pengalaman belajar, organisasi, evaluasi kurikulum, dan kebutuhan masyarakat.
- b) *Prinsip Kontinuitas*, pengembangan kurikulum yang berkesinambungan secara vertical dan horizontal.
- c) *Prinsip Fleksibilitas*, kurikulum harus mampu disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat, termasuk kebutuhan dan potensi budaya daerah. Kurikulum harus selalu berkembang tanpa merubah tujuan pendidikan yang harus dicapai.
- d) *Prinsip Berorientasi pada tujuan*, tujuan kurikulum mengandung aspek-aspek pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai.

- e) *Prinsip Efisiensi dan Efektifitas*, pengembangan kurikulum harus mempertimbangkan segi efisien dalam pendayagunaan dana, waktu, tenaga, sumber-sumber yang tersedia agar dapat mencapai hasil yang optimal.
- f) *Prinsip Keseimbangan*, adanya keseimbangan sehingga terjalin perpaduan yang lengkap dan menyeluruh.
- g) *Prinsip Keterpaduan*, diharapkan terbentuknya pribadi yang utuh, dapat pula diterapkan dalam pembelajaran, misalnya dalam interaksi antara siswa dan guru maupun antara teori dan praktik.
- h) *Prinsip mutu*, pendidikan bermutu ditentukan oleh derajat mutu guru, kegiatan belajar mengajar, sarana/prasarana, dan media yang bermutu.

Pada paparan prinsip tentang pengembangan Kurikulum, dasar pelaksanaan pada kurikulum bahasa terutama bahasa daerah dilihat pada kedudukan dan fungsi bahasa berdasarkan UUD 1945 Bab XIII Pasal 32, Ayat 2, yang berbunyi “Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional” serta UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 pasal 33 ayat (2), bahwa bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam

tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu. Dalam penjelasan ayat tersebut pengajaran bahasa daerah pada jenjang pendidikan dasar di suatu daerah disesuaikan dengan intensitas penggunaannya dalam wilayah yang bersangkutan. Tahap awal pendidikan adalah pendidikan pada tahun pertama dan kedua sekolah dasar sehingga menjadi dasar dalam pengembangan kurikulum bahasa daerah.

2.) Prinsip Pelaksanaan Kurikulum Bahasa

Pada peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, dikemukakan prinsip-prinsip pelaksanaan kurikulum disetiap satuan pendidikan sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan kurikulum didasarkan pada potensi, perkembangan dan kondisi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang berguna bagi dirinya.
- b) Kurikulum dilaksanakan dengan menegakkan lima pilar belajar, yaitu (1) belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (2) belajar untuk memahami dan menghayati, (3) belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif, (4) belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain, (5) belajar untuk membangun dan menemukan jati diri, melalui proses pembelajaran yang aktif, dan menyenangkan.
- c) Pelaksanaan kurikulum memungkinkan peserta didik mendapat pelayanan yang bersifat perbaikan, pengayaan, atau percepatan sesuai dengan potensi, tahap perkembangan, dan kondisi peserta didik dengan tetap memperhatikan keterpaduan pengembangan pribadi peserta didik yang berdimensi Ke- Tuhanan, keindividuan, kesosialan, dan moral.
- d) Kurikulum dilaksanakan dalam suasana hubungan peserta didik dan pendidik yang saling menerima dan menghargai, akrab, terbuka, dan hangat dengan prinsip Tut Wuri Handayani.
- e) Kurikulum dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan multistrategi dan multimedia, sumber belajar dan teknologi yang memadai, dan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar.

- f) Kurikulum dilaksanakan dengan memanfaatkan kondisi alam, social, dan budaya serta kekayaan daerah untuk keberhasilan pendidikan dengan muatan seluruh bahan kajian secara optimal.
- g) Kurikulum yang mencakup seluruh komponen kompetensi mata pelajaran, Muatan local dan pengembangan diri diselenggarakan dalam keseimbangan, keterkaitan, dan kesinambungan yang cocok dan memadai antara kelas dan jenis serta jenjang pendidikan.

Beberapa pendekatan dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum

Bahasa Daerah terdiri dari:

- a) Pendekatan mata pelajaran yaitu bertitik tolak dari mata pelajaran (subjek matter) yang masing-masingnya berdiri sendiri.
- b) Interdisipliner yaitu suatu gejala social yang saling tali temali baik dari segi social, politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya.
- c) Integrative atau terpadu yaitu bertitik tolak dari suatu keseluruhan atau suatu kesatuan yang bermakna dan berstruktur.
- d) System yaitu suatu totalitas yang terdiri dari sejumlah komponen atau bagian-bagian.

c.) Fungsi Bahasa daerah dalam pembelajaran di tingkat Sekolah Menengah Pertama

Secara umum bahasa didefinisikan sebagai lambang. Bahasa adalah alat komunikasi yang berupa system lambang bunyi yang dihasilkan alat ucap manusia. Fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan informasi. Namun perlu diketahui juga bahwa fungsi bahasa pada

dasarnya lebih dari sekadar alat untuk menyampaikan informasi, atau mengutarakan pikiran, perasaan, atau gagasan.

Pembahasan dalam fungsi bahasa pada pembelajaran bahasa daerah ditingkat SMP sangat besar artinya. Ada beberapa alasan mengapa penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan dan pengajaran ditawarkan. Alasan pertama berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendidikan dan kebudayaan termasuk bidang pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam bab IV, pasal 7 UU Nomor 22, Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah disebutkan :

“kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, militer dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain”.

Bahkan, bidang pendidikan dan kebudayaan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, sebagaimana disebutkan dalam pasal 11, ayat 2, bab IV UU itu. Dengan demikian, menjadikan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan tidak begitu menjadi masalah bagi pemerintah daerah karena merupakan bagian dari kewenangannya. Dalam bab VII, UU Nomor 20, Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 33, tentang bahasa pengantar disebutkan bahwa bahasa pengantar dalam pendidikan nasional adalah bahasa Indonesia (ayat 1); namun, bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan atau keterampilan tertentu (ayat 2).

Alasan kedua berkaitan dengan upaya “memaksa” orang tua untuk

menggunakan bahasa daerah ketika berkomunikasi dengan anaknya di dalam keluarga atau di rumah. Bisa jadi situasi tertentu yang dimaksud adalah pembelajaran di lembaga pendidikan yang memiliki kecenderungan kuat untuk menggunakan bahasa Indonesia sejak di taman kanak-kanak sebagai bahasa pengantarnya. Dugaan ini masuk akal karena siapa pun akan khawatir kalau anak-anaknya tidak bisa mengikuti kegiatan belajar di kelas, karena tidak bisa menguasai bahasa pengantar yang digunakan. Oleh karena itu, penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar dalam pembelajaran di kelas akan mendorong para orang tua untuk membiasakan anak-anak mereka berbahasa daerah di rumah sebelum memasuki dunia sekolah. Alasan ketiga berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya teoretis. Peristiwa pembelajaran adalah suatu peristiwa interaksi yang sekurang-kurangnya, berlangsung antara guru dan siswa. Interaksi, dalam hal ini, sudah pasti bermediakan bahasa. Jika bahasa daerah diwajibkan untuk dijadikan bahasa pengantar di dalam pembelajaran, tentu di dalam interaksi itu bahasa daerahlah yang digunakan. Ini berarti bahwa peristiwa pembelajaran menjadi kaya dengan lingkungan bahasa daerah informal yang sangat diperlukan dalam rangka anak memperoleh bahasa daerah itu. Sebagaimana dikatakan oleh Fishman (1996), sekolah merupakan tempat yang sangat penting bagi penggunaan beberapa aspek bahasa.

Tentang pentingnya interaksi dalam pemerolehan bahasa dikemukakan oleh Ellis (1990). Dikatakan bahwa interaksi dapat dihipotesiskan berkontribusi pada pemerolehan bahasa melalui dua cara. Pertama, melalui resepsi dan pemahaman anak atas bahasa yang digunakan oleh guru. Teori belajar bahasa berdasarkan resepsi sangat menekankan pentingnya input. Hipotesis frekuensi

menyatakan bahwa anak memperoleh ciri-ciri linguistik sesuai dengan frekuensinya sebagai input. Semakin sering suatu ciri linguistik didengar oleh anak, semakin cepat ciri itu dikuasai oleh anak. Kedua, melalui upaya anak memproduksi bahasa itu di dalam peristiwa pembelajaran. Swain (dalam Ellis, 1990) mengajukan hipotesis output. Hipotesis ini menyatakan bahwa anak memerlukan kesempatan untuk memproduksi bahasa dalam rangka mengembangkan tingkat profisiensi gramatikalnya. Hal ini ternyata didukung oleh Ellis. Menurut Ellis (1990), output sangat penting bagi terjadinya pemerolehan bahasa. Dengan demikian, jika bahasa daerah digunakan sebagai bahasa pengantar di dalam pembelajaran, niscaya penguasaan bahasa daerah oleh anak akan dapat ditingkatkan.

Peranan pemerintah daerah yang mana penulis mencoba mengambil sampel dari domisili penulis yaitu Kecamatan Lamasi Timur, mengharapkan agar pelaksanaan terhadap kebijakan yang akan diambil dapat menjadi pertimbangan pemerintah daerah bahwa peranan bahasa daerah sangat andil dan penting dalam peningkatan mutu pendidikan. Khususnya di tingkat SMP di tahun ajaran berikutnya. Ini menjadi moment yang tepat bagaimana pemerintah daerah memperhatikan pendidikan di daerah melalui kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah.

B. Kerangka Pikir

Dengan memperhatikan uraian pada bagian sebelumnya, maka pada bagian ini diuraikan beberapa hal yang dijadikan penulis sebagai landasan berpikir yang dimaksudkan akan mengarahkan penulis untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini guna memecahkan masalah

yang telah dipaparkan. Untuk itu, penulis menguraikan secara rinci landasan berpikir yang dijadikan pengarah dalam penelitian ini.

Undang-undang tentang otonomi daerah NO. 12 tahun 2008 memberikan gambaran tentang segala hal yang kemudian menjadi kewenangan daerah dalam hal pembagian urusan kewenangan. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 14 dan mengenai kewajiban daerah yang diatur dalam pasal 22, yang menguraikan tentang hal-hal apa saja yang harus atau wajib dilakukan oleh pemerintah, seperti di dalamnya bagaimana pemerintah berkewajiban dalam melakukan pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan. Hal inilah kemudian yang harus dijalankan oleh pemerintah, khususnya pemerintah daerah yang diimplementasikan dalam bentuk pemberian pelayanan sesuai dengan program dari bidang masing-masing.

Adapun Kebijakan Pelayanan yang digambarkan pada skema yakni bagaimana Arah Kebijakan terhadap pelayanan pendidikan terhadap Bahasa Daerah ditingkat SMP. Variable dari Pelayanan pendidikan Bahasa Daerah sendiri akan dijelaskan sebagai berikut.

Untuk bidang pendidikan variable yang akan digunakan dalam Kebijakan dan Pelayanan Pendidikan diimplementasikan pada Bahasa Daerah ditingkat SMP. Pengertian Kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yg menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tata pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Implementasi terhadap kebijakan dimaksud mengarah bagaimana meningkatkan mutu pendidikan terhadap Bahasa Daerah yang

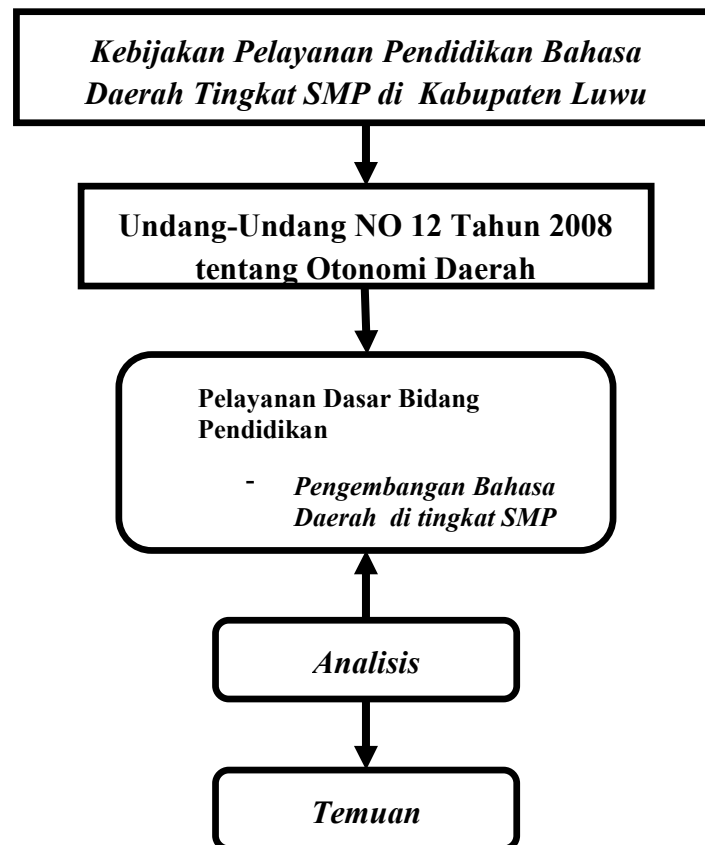
merupakan salah satu warisan budaya bangsa. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 24/2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara yang di dalamnya mengatur pentingnya perlindungan, pelestarian dan pembinaan bahasa daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009, mendefinisikan bahwa bahasa daerah merupakan bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh warga negara Indonesia. Di daerah-daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, bahasa daerah dapat diibaratkan sebagai jati diri masyarakat dari daerah tersebut. Indonesia memiliki sekitar 700 bahasa daerah yang tersebar di 33 provinsi (Media Indonesia.com edisi 28 April 2012), diantaranya bahasa daerah Sunda, Jawa, Madura, Bali, Bugis, Sasak, Makassar, Buton dan lain-lain. Berdasarkan Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, penanganan bahasa menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan dalam pelaksanaan tanggung jawab itu, pemerintah daerah harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat sebagai pembuat kebijakan nasional kebahasaan. Selain berupa pembagian tugas yang lebih terperinci, koordinasi itu dapat juga berupa fasilitasi kepakaran dan dukungan sumber daya.

Dari penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009, diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu dalam Pelayanan dimaksud mengambil langkah percepatan penanganan Bahasa Daerah. Untuk jenjang pendidikan tingkat Sekolah Menengah, dengan membuat Program tentang Ajuan Pelajaran Bahasa Daerah pada Kurikulum 2014. Ini dimaksudkan dengan tujuan memberikan pengetahuan, keterampilan dan perilaku kepada siswa agar mereka memiliki wawasan yang mantap yang berlaku didaerahnya (sejarah, daerah, adat

istiadat, budaya, tradisi, kesenian tradisional dan lain-lain) dan mendukung pelestarian pembangunan daerah.

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat bagannya kerangka pikir sebagai berikut



Gambar. Bagan kerangka pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara jelas fakta yang ada di lapangan, mengenai pelaksanaan pelayanan pendidikan SMP di kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan survey yaitu penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan daftar pertanyaan sebagai alat pengumpulan data.

B. Lokasi penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di tingkat SMP di Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu dan instansi-instansi terkait dengan penelitian yang dilakukan di Kecamatan Lamasi dan Instansi Kabupaten Luwu.

1. Demografi Kecamatan Lamasi

Kecamatan Lamasi dibentuk berdasarkan Undang-undang nomor 2 tahun 2006, yang merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Lamasi. Kecamatan Timur terdiri dari 7 Desa yakni desa seriti, pelalan, to'lemo, sinangkala, bululondong, pompengan, dan pompengan pantai. Kegiatan pemerintahan dan perekonomian daerah dipusatkan di Desa To'lemo dan di seluruh wilayah Desa secara bertahap, dilakukan pada pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana.

Kecamatan Lamasi terletak di bagian Timur Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan. Secara geografis terletak pada posisi : $2^{\circ} 3' 45''$ - $3^{\circ} 37' 30''$ Lintang selatan, dan $119^{\circ} 15''$ – $121^{\circ} 43' 11''$ Bujur Timur.

Kecamatan Lamasi mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : Kecamatan Lamasi
- b. Sebelah timur : Kabupaten Luwu Utara
- c. Sebelah selatan : Kecamatan Walenrang Timur
- d. Sebelah barat : Kecamatan Lamasi dan Kecamatan Walenrang Timur

Luas wilayah Kecamatan Lamasi Timur 57,65 Km², Kecamatan Lamasi Timur secara administrasi pemerintahan terbagi atas 7 desa. Desa Bululondong merupakan Desa terluas dengan luas wilayah 22,90 Ha, dari seluruh wilayah Kecamatan Lamasi Timur, sedangkan Desa dengan luas terkecil adalah Desa Pompengan dengan luas 2,16 Ha.

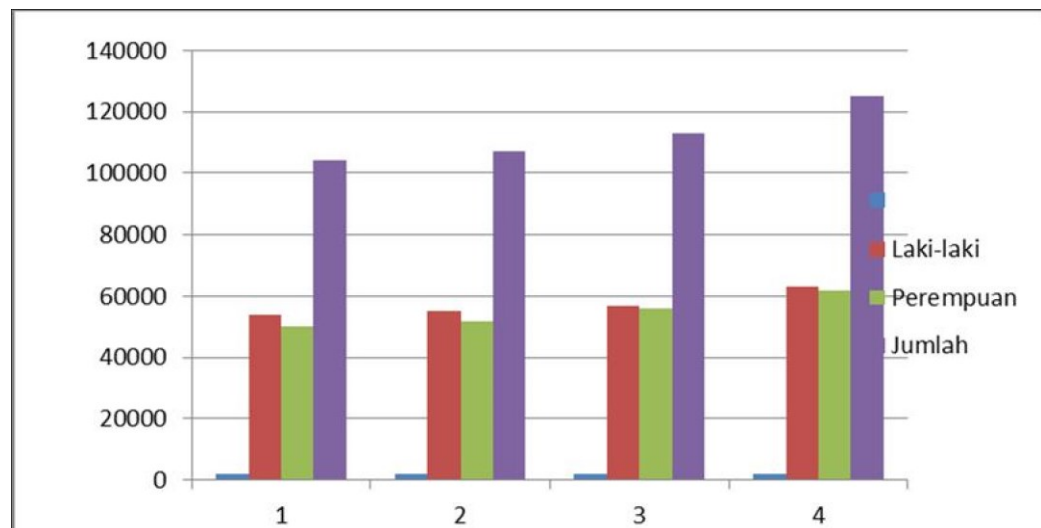
Desa dengan jarak yang paling jauh dari kecamatan mempunyai jarak sekitar 11,00 km yaitu desa Pompengan Pantai , sedangkan desa yang terdekat adalah desa Sinangkala mempunyai jarak sekitar 2,00 km dari kecamatan.

2. Kondisi Penduduk

Berdasarkan data yang dikumpulkan dari tiap kantor desa di Kecamatan Lamasi Timur pada tahun 2008-2009 didapatkan jumlah penduduk Kecamatan Lamasi Timur berjumlah 12.114 Jiwa. Angka ini menunjukkan adanya pertumbuhan penduduk di Kecamatan Lamasi Timur

sebesar 9,29% dibandingkan dengan tahun 2006-2007 berdasarkan dengan sumber data yang sama.

**Diagram Jumlah Penduduk Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu
Provinsi Sulawesi Selatan**



Gambar 2.

Sumber : Olahan Data Sekunder 2003

Jumlah penduduk laki-laki Kecamatan Lamasi lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan Kecamatan Lamasi Timur. Hal ini dapat dilihat dari rasio jenis kelamin penduduk Kecamatan Lamasi yang mempunyai nilai sebesar 6.051. Angka ini mempunyai arti untuk setiap 6.051 penduduk laki-laki terdapat 100 penduduk perempuan.

Jumlah penduduk Kecamatan Lamasi paling besar berada di Desa Seriti yaitu sebesar 2.564 jiwa. Namun demikian Desa dengan kepadatan penduduk paling tinggi adalah Desa Pelalan dengan kepadatan penduduk sebesar 2.011 jiwa per km².

C. Data dan Sumber Data

1) Data

Data dalam penelitian ini adalah kebijakan pelayanan pendidikan bahasa daerah.

2) Sumber Data

Sumber data yang diambil oleh peneliti diperoleh dari kosioner yang peneliti edarkan berdasarkan tehnik purposife sampling merupakan salah satu tehnik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti yang menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti. Secara bahasa, kata purposive berarti sengaja. Jadi sederhananya purposive sampling berarti tehnik pengambilan sampel secara sengaja. Maksudnya penelitian menentukan sendiri sampel yang diambil secara tidak acak, akan tetapi ditentukan sendiri oleh peneliti (Sugiyono,2016: 218-219)

Informan dalam penelitian ini merupakan Kepala Dinas, dan Kepala Sekolah, dan Masyarakat setempat.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai instrumen dengan menggunakan media kosioner sebagai alat bantu. Nasution (dalam Sugiyono, 2014: 306-307) mengemukakan bahwa dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain dari pada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya, bahwa segala sesuatu belum mempunyai bentuk yang pasti, maka yag menjadi intrumen adalah peneliti sendiri. Tetapi setelah masalahnya yang akan diperjelas, dapat

dikembangkan suatu instrumen. Selanjutnya setelah fokus peneliti menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan data yang telah ditemukan melalui observasi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti, digunakan teknik pengumpulan data dengan 2 cara yaitu:

a. Pengumpulan Data Primer

Adapun pengumpulan data primer adalah data yang diperoleh dari hasil :

- 1) Koesioner atau daftar pertanyaan yaitu teknik pengumpulan data dengan koesioner kepada responden. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang berkenaan dengan penelitian yang dilaksanakan.
- 2) Teknik interview atau wawancara yaitu melakukan wawancara baik secara mendalam maupun secara bebas kepada informan dan responden yang dianggap mengetahui permasalahan.
- 3) Teknik observasi yaitu dengan melakukan pengamatan langsung untuk mengumpulkan data dan informasi tentang penelitian yang dilaksanakan.

b. Pengumpulan Data Sekunder

Studi pustaka

Data diperoleh melalui studi pustaka yaitu mengambil data dari sejumlah buku, literatur maupun perundang-undangan yang berkenaan dengan penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil dan Analisis Data

Pada bab pembahasan dan hasil ini diuraikan temuan dilapangan tentang bagaimana pelaksanaan pelayanan bidang pendidikan Bahasa Daerah di Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu dan Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pelayanan bidang pendidikan bahasa daerah di tingkat SMP di Kabupaten Luwu. Namun sebelumnya akan diuraikan terlebih dahulu tentang gambaran umum mengenai karakteristik dari masing-masing responden yang telah disurvey.

B. Karakteristik Responden

1. Tempat Tinggal

Berikut ini akan ditampilkan tabel mengenai tempat tinggal responden dari masyarakat dan aparat. untuk mengetahui wilayah tempat tinggal responden masyarakat ,dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1.Tempat Tinggal Responden (Masyarakat) Kabupaten Luwu

Wilayah	Frekwensi (F)	Persentase (%)
Pompengan Pantai	3	10%
Pompengan	4	13,33%
Bululondong	6	23,33%
Pelalan	5	16,66%
To'lemo	5	16,66%
Sinangkala	3	10%
Seriti	4	13,33%
Jumlah	30	100

Sumber : Olahan Data Primer 2017

Dari data yang tersaji dapat dilihat bahwa untuk responden masyarakat yang berjumlah 30 orang yang paling banyak frekwensinya berada di Desa Bululondong 6 Responden atau dengan persentase 20,33%. Desa To'lemo dan desa pelalan masing-masing 5 responden dengan persentase 16,66%, desa pompengan pantai dan Sinangkala masing-masing 3 Responden dengan persentase 10%. Kemudian desa seriti dan desa pompengan masing-masing 4 responden dengan persentase 13,33%. Sedangkan untuk mengetahui wilayah atau kecamatan yang paling banyak ditempati oleh responden aparat dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini.

Tabel 2.Tempat Tinggal Responden (Aparat)

Wilayah	Frekwensi (F)	Persentase (%)
Pompengan Pantai	4	10 %
Pompengan	4	10%
Bululondong	7	17,5 %
Pelalan	5	12,5 %
To'lemo	6	15%
Sinangkala	4	10 %
Seriti	4	10%
Kab. Luwu	6	15%
Jumlah	40	100%

Sumber : Olahan Data Primer 2017

Tabel 2 memperlihatkan bahwa aparat yang dijadikan responden dalam hal ini Guru dan pegawai dinas pendidikan sebanyak 40 orang, yang paling banyak tinggal di desa Bululondong dengan jumlah 7 orang dengan persentase 17,5%, desa pompengan pantai, desa pompengan, desa Sinangkala , Desa Seriti masing-masing 4 orang dengan persentase 10 %, sedangkan Desa To'lemo, dan kabupaten luwu masing-masing 6 orang dengan persentase 15%. Dan Desa Pelalan 5 orang dengan persentase 12,5%.

Dari keseluruhan tentang tempat tinggal responden memperlihatkan bahwa responden paling banyak tinggal di Desa Bululondong.

2. Jenis Kelamin

Berikut ini akan ditampilkan tabel mengenai keseluruhan dari responden yang ada, baik itu aparat dan masyarakat. untuk mengetahui karakteristik masyarakat dari jenis kelaminnya akan ditampilkan pada tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Jenis Kelamin Responden (Masyarakat)

Jenis Kelamin	Frekwensi (F)	Persentase (%)
laki-laki	12	40 %
Perempuan	18	60%
Total	30	100.0

Sumber : Olahan Data Primer 2017

Dari tabel 3 menunjukkan bahwa jumlah responden dari segi jenis kelamin untuk responden masyarakat yang paling banyak ialah responden

Perempuan yakni sebanyak 18 orang dengan persentase 60% sedangkan untuk Laki-laki sebanyak 12 orang atau dengan persentase 40 %. dari data yang telah diuraikan dapat diketahui bahwa jumlah responden untuk masyarakat yang paling banyak ialah Perempuan. Untuk mengetahui karakteristik responden dari jenis kelamin untuk aparat dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini.

Tabel 4. Jenis Kelamin (Aparat)

Jenis kelamin	Frekwensi (F)	Persentase (%)
laki-laki	23	57,5%
Perempuan	17	42,5%
Total	40	100.0

Sumber : Olahan Data Primer 2017

Dari data menunjukkan bahwa dari 40 orang untuk aparat jumlah responden yang paling banyak ialah laki-laki dengan jumlah 23 orang atau dengan persentase 57,5% sedangkan perempuan sebanyak 17 orang atau dengan persentase 42,5%. Dari keseluruhan data yang ada menunjukkan bahwa jumlah responden yang paling banyak menurut jenis kelamin ialah laki-laki.

3. Usia

Untuk mengetahui usia masing-masing responden dapat terlihat pada tabel 5 berikut.

Tabel 5.Usia Responden (Masyarakat)

Usia	Frekwensi (F)	Persentase (%)
17-27	7	23.33%
28-38	9	30%
39-49	10	33.34%
50-60	4	13.33%
Total	30	100.0

Sumber : Olahan Data Primer 2017

Dari tabel 5 menunjukkan bahwa untuk usia responden masyarakat dari 30 responden yang ada menunjukkan bahwa jumlah responden yang paling banyak ialah dengan usia dari 39-49 tahun dengan frekwensi 10 orang atau dengan persentase 33.34%. selanjutnya ialah umur 28-38 tahun dengan jumlah 9 orang atau dengan persentase 30%, sedangkan untuk umur 17-27 tahun berjumlah 7 orang atau dengan persentase 23.33%. sedangkan jumlah responden yang paling kecil dengan umur dari 50-60 tahun yakni berjumlah 4 orang atau dengan persentase 13.33%. untuk mengetahui rata-rata umur untuk responden aparat dapat dilihat pada tabel 6 berikut ini.

Tabel 6.Usia Responden (Aparat)

Usia	Frekwensi (F)	Persentase (%)
17-27	6	15%

28-38	13	32.5%
39-49	12	30%
50-60	9	22.5%
Total	40	100.0

Sumber ; Olahan Data primer 2017

Pada tabel 6 menunjukkan bahwa dari 40 responden untuk aparat bahwa jumlah responden yang paling banyak ialah dengan usia dari umur 28-38 tahun dengan frekwensi 13 orang atau dengan persentase 32,5%, selanjutnya ialah umur 39-49 tahun berjumlah yakni 12 orang dengan persentase 30%, Untuk umur 50-60 tahun berjumlah 9 orang dengan presentase 22.5%. Sedangkan jumlah responden yang paling kecil dengan umur 17-27 tahun dengan persentase 15%. Dari keseluruhan mengenai usia dari keseluruhan responden (aparat dan Masyarakat) menunjukkan bahwa jumlah responden dengan umur 28-38 tahun adalah yang paling banyak.

4. Pekerjaan

Untuk mengetahui karakteristik responden yang dilihat dari jenis pekerjaannya akan ditampilkan pada tabel 7 berikut ini.

Tabel 7.Pekerjaan

Pekerjaan	Masyarakat		Aparat	
	Frekwensi (F)	Persentase (%)	Frekwensi (F)	Persentase (%)
Petani	7	23,33	-	-

Nelayan	-	-	-	-
pedagang/wiraswasta	6	20	-	-
PNS/honorer	-	-	40	100
siswa/mahasiswa	5	16,66	-	-
ibu rumah tangga	6	20	-	-
Pensiunan	2	6,66	-	-
Lainnya	4	13,33	-	-
Total	30	100.0	40	100

Sumber Olahan Data Primer 2017

Dari tabel 7 menunjukkan bahwa dari 100 responden (Masyarakat dan Aparat) yang ada bahwa untuk jumlah responden yang paling banyak ialah yang pekerjaannya PNS/honorer, ada juga yang sebagai ibu rumah tangga, selanjutnya ialah responden yang mata pencahariannya petani, pedagang, siswa/mahasiswa dan yang bermata pencaharian lain.

5. Pendidikan Terakhir

Untuk mengetahui tingkat pendidikan terakhir responden baik itu masyarakat maupun aparat dapat terlihat pada tabel berikut. Untuk masyarakat dapat dilihat pada tabel 8 berikut.

Tabel 8. Pendidikan Terakhir (Masyarakat)

Tingkat Pendidikan	Frekwensi (F)	Pesentase (%)
SD	3	10
SMP	6	20
SMA	12	40
Diploma	7	24
S1	2	6
Total	30	100

Sumber : Olahan Data Primer 2017

Dari tabel 8 menunjukkan bahwa untuk responden masyarakat yang berjumlah 30 orang menunjukkan bahwa jumlah responden yang paling banyak ialah yang berpendidikan terakhir SMA dengan jumlah 12 orang atau dengan persentase 40%, selanjutnya ialah yang berpendidikan Diploma (DI, DII dan DIII), dengan jumlah 7 orang atau dengan persentase 24%, dan untuk yang berpendidikan S1 juga berjumlah 2 orang atau dengan persentase 6%. yang lainnya ialah responden yang berpendidikan SMP dengan jumlah 6 orang atau dengan persentase 20%, sedangkan SD 3 orang dengan persentase 10 %. Untuk mengetahui

tingkat pendidikan aparat dapat dilihat pada tabel 9 berikut.

Tabel 9. Pendidikan Terakhir (Aparat)

Pendidikan Terakhir	Frekwensi (F)	Persentase (%)
----------------------------	----------------------	-----------------------

SMA	2	5%
Diploma	12	30%
S1	22	55%
S2	4	10%
Total	40	100.0

Sumber : Olahan Data Primer 2017

Dari tabel 9 menunjukkan bahwa dari tingkat pendidikan terakhir aparat yang paling banyak ialah yang tingkatannya S1 dengan jumlah 22 orang atau dengan persentase 55%, selanjutnya ialah yang berpendidikan Diploma (DI, DII dan DIII) dengan jumlah 12 orang atau dengan persentase 30%. untuk tingkat pendidikan terakhir S2 berjumlah 4 orang dengan persentase 10% dan yang tingkat pendidikannya SMA ialah 2 orang dengan persentase 5 %.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan Bahasa Daerah Tingkat SMP di

Kab. Luwu

Pelayanan dasar bidang pendidikan yang akan dibahas di sini ialah bagaimana pelaksanaan pembelajaran bahasa daerah yang diadakan di Kabupaten Luwu. Selanjutnya Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah menengah pertama (Smp).

Pada era globalisasi, pendidikan merupakan salah satu sarana terpenting dalam menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas

untuk membawa perubahan yang berarti bagi bangsa dan negara. Mencermati pelayanan pendidikan, utamanya pelayanan pendidikan. Oleh sebab itu agar dapat memberikan yang terbaik, maka diperlukan adanya peningkatan pelayanan pendidikan.

Dari persentase yang didapatkan Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu ketika ditanyakan pertanyaan, Bapak Drs. H. Pahri, MM menyatakan bahwa:

“Bahasa daerah itu harus di budidayakan, jadi harus diajarkan walaupun itu dalam bentuk mulok. Ada beberapa sekolah yang belajar bahasa daerah. Hanya saja kita terkendala guru, jadi kalau masalah kurikulum kita sudah menghimbau untuk dimasukkan pelajaran Bahasa daerah. Bahasa daerah itu kan perlu dilestarikan dan di kembangkan karena merupakan cagar budaya dan itu juga merupakan sumber dana APBD, karena apa? Dari segi wisatanya. Jadi sangat perlu diajarkan. Kita mengharapkan seorang guru yang benar-benar memahami akan bahasa daerah, bukan seperti yang dipasar-pasar itu, tetapi harus terstruktur. Cuma karena guru itu tidak ada sehingga hampir semua sekolah yang ada di Kabupaten Luwu terutama daerah yang akan saudara kunjungi itu tidak semua belajar bahasa daerah hanya saja mereka belajar dari buku-buku itu. Jadi kami ini sudah menyampaikan kepada pihak sekolah bagaimana kedepannya bahasa daerah ini diadakan setiap sekolah. Kita mendorong kepada pemerintah supaya ada pengangkatan minimal itu satu orang per kecamatan. Jadi saya sangat prihatin ketika tidak ada sekolah yang mengajarkan bahasa daerah itu”.

Hal senada dikemukakan pula oleh Bapak Anton

Mangentang, S.Pd (Kepala Smpn 1 lamasi) dimana mengemukakan bahwa:

“Bahasa daerah perlu diajarkan di sekolah, anjuran dari Diknas, harus menguasai tiga bahasa yaitu, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan bahasa daerah, dengan munculnya kurikulum KTSP, karena siswa membutuhkan bahasa daerah. Dinas pendidikan sebaiknya mengeluarkan kurikulum untuk pembelajaran bahasa daerah. Kemungkinan ada dua versi, yang mayoritas bahasa Bugis diajarkan bahasa Bugis dan yang mayoritas bahasa Toraja diajarkan bahasa Toraja. Membawakan cerita dalam bentuk dongeng dalam bahasa Toraja, kemudian apa makna cerita itu, siswa semangat di dalam belajar. Siswa lebih paham ketika diajarkan dalam bahasa Toraja atau

sebagai pengantar di dalam kelas. Di iringi dan di paraktekan dengan pantun anak menyukai akan hal itu”.

Dari data-data yang telah dipaparkan, terlihat bahwa memang Pendidikan Bahasa Daerah khususnya ditingkat Smp yang ada di Kecamatan Lamasi Timur memang kurang mendapat perhatian. Walau ada sekolah yang masih belajar tentang bahasa daerah itu sendiri, dengan upaya dan usaha sekolah tertentu masih mampu menyediakan waktu, tenaga didik dan sarana berupa buku yang didapatkan dari pembelian dengan dana sekolah tersebut. Dengan alasan bahwa diperlukan kesadaran sendiri bagaimana kita melestarikan daerah kita dengan membudidayakan bahasa daerah. Olehnya itu, pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan untuk melakukan sesuatu hal agar kurikulum berikutnya pada tahun ajaran selanjutnya sudah terpenuhi tentang pembelajaran bahasa daerah. Dengan adanya perubahan itu, nantinya pihak sekolah juga diharapkan mampu mengangkat kecintaan daerah terutama anak sekolah untuk memahami dan mengetahui pentingnya pendidikan bahasa daerah tersebut, dan bagaimana kedepannya anak didik mampu menguasai bahasa dimanapun ia berada. Dan untuk itu dinas pendidikan memanfaatkan pendanaan apabila sudah termuat dalam pendanaan daerah. Selanjutnya, yang mana dapat benarbenar dipergunakan untuk Peningkatan pendidkan bahasa daerah.

Hasil penelitian ini dideskripsikan berdasarkan hasil wawancara dari pihak-pihak yang dipilih sesuai dengan tujuan dari Penelitian. Serta metode pengumpulan data yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Penelitian ini menitik beratkan tentang Kebijakan Pemerintah Daerah, dalam Peningkatan Pelayanan terutama Pendidikan Bahasa Daerah. Yang penempatan lokasi

diambil adalah Kecamatan Lamasi Timur, ini mengingat tentang asal daerah penulis sendiri. Hasil Deskripsi tentang penelitian ini dapat dikemukakan beberapa detail komponen pendukung sehingga masalah dalam penelitian ini dapat dipaparkan secara jelas yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan Dalam Kebijakan Pelayanan Pendidikan Bahasa Daerah

a. Penggunaan Bahasa Daerah Sebagai Bahasa Pengantar Pembelajaran

Ada beberapa alasan mengapa penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar dalam pengajaran ditawarkan. Alasan pertama berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendidikan dan kebudayaan termasuk bidang pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam bab IV, pasal 7 UU Nomor 22, Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah disebutkan, “kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, militer dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain”. Bahkan, bidang pendidikan dan kebudayaan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, sebagaimana disebutkan dalam pasal 11, ayat 2, bab IV UU itu. Dengan demikian, menjadikan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan tidak begitu menjadi masalah bagi pemerintah daerah karena merupakan bagian dari kewenangannya. Dalam bab VII, UU Nomor 20, Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 33, tentang bahasa pengantar disebutkan bahwa bahasa pengantar dalam pendidikan nasional adalah bahasa Indonesia (ayat 1);

namun, bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan / atau keterampilan tertentu (ayat 2).

Alasan kedua berkaitan dengan upaya “memaksa” orang tua untuk menggunakan bahasa daerah ketika berkomunikasi dengan anaknya di dalam keluarga atau di rumah. Sementara ini, salah satu alasan para orang tua suku Toraja ataupun Bugis menggunakan bahasa Toraja atau Bugis yang diselipi unsur-unsur bahasa Indonesia. Bahkan bahasa Indonesia secara murni di rumah adalah agar anak-anak mereka bisa berbahasa Indonesia untuk kepentingan komunikasi dalam situasi tertentu (Sutama dan Suandi, 2000). Bisa jadi situasi tertentu yang dimaksud adalah pembelajaran di lembaga pendidikan yang memiliki kecenderungan kuat, untuk menggunakan bahasa Indonesia sejak di taman kanak-kanak sebagai bahasa pengantarnya. Dugaan ini masuk akal karena siapa pun akan khawatir kalau anak-anaknya, tidak bisa mengikuti kegiatan belajar di kelas karena tidak bisa menguasai bahasa pengantar yang digunakan. Oleh karena itu, penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar dalam pembelajaran di kelas, akan mendorong para orang tua untuk membiasakan anak-anak mereka, berbahasa daerah di rumah sebelum memasuki dunia sekolah.

Alasan ketiga berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya teoritis. Peristiwa pembelajaran adalah suatu peristiwa interaksi yang sekurang-kurangnya, berlangsung antara guru dan siswa. Interaksi dalam hal ini, sudah pasti bermediakan bahasa. Jika bahasa daerah diwajibkan

untuk dijadikan bahasa pengantar di dalam pembelajaran, tentu di dalam interaksi itu bahasa daerahlah yang digunakan. Ini berarti bahwa peristiwa pembelajaran menjadi kaya dengan lingkungan bahasa daerah informal yang sangat diperlukan dalam rangka anak memperoleh bahasa daerah itu. Sebagaimana dikatakan oleh Fishman (1996), sekolah merupakan tempat yang sangat penting bagi penggunaan beberapa aspek bahasa.

Tentang pentingnya interaksi dalam pemerolehan bahasa dikemukakan oleh Ellis (1990). Dikatakan bahwa interaksi dapat dihipotesiskan berkontribusi pada pemerolehan bahasa melalui dua cara. Pertama, melalui resepsi dan pemahaman anak atas bahasa yang digunakan oleh guru. Teori belajar bahasa berdasarkan resepsi sangat menekankan pentingnya input. Hipotesis frekuensi menyatakan bahwa anak memperoleh ciri-ciri linguistik sesuai dengan frekuensinya sebagai input. Semakin sering suatu ciri linguistik didengar oleh anak, semakin cepat ciri itu dikuasai oleh anak. Kedua, melalui upaya anak memproduksi bahasa itu di dalam peristiwa pembelajaran. Swain (dalam Ellis, 1990) mengajukan hipotesis output. Hipotesis ini menyatakan bahwa anak memerlukan kesempatan untuk memproduksi bahasa dalam rangka mengembangkan tingkat profisiensi gramatikalnya. Hal ini ternyata didukung oleh Ellis. Menurut Ellis (1990), output sangat penting bagi terjadinya pemerolehan bahasa. Dengan demikian, jika bahasa daerah digunakan sebagai bahasa

pengantar di dalam pembelajaran, niscaya penguasaan bahasa daerah oleh anak akan dapat ditingkatkan.

Sementara itu, Pemaparan dari Bapak Drs. Muhammad Yusuf, M.Pd selaku Kepala Bidang Pendidikan Dinas pendidikan Kabupaten Luwu menyatakan bahwa:

“ Sistematika pembelajaran di sekolah mayoritas masih menggunakan bahasa daerah sebagai pengantar pembelajaran, Interaksi biasanya terjadi dalam kelas apabila bahasa daerah digunakan dalam komunikasi antara guru dan siswa. Frekuensinya lebih banyak guru menggunakan bahasa daerah”.

Disisi lain, Ibu Guru Muniaty, S.Pd selaku Guru Sekolah (Smpn 3 lamasi) menyatakan bahwa:

“ Bahasa daerah merupakan suatu kebudayaan atau kekayaan yang perlu dikembangkan, jadi perlu dipelajari ataupun diajarkan, pada saat mengajarpun 50% kita menggunakan Bahasa daerah sebagai pengantar, karena siswa lebih memahami pelajaran yang diberikan. jika bisa perlu ada Pengadaan buku, lab bahasa kemudian dirangkaikan dengan kesenian itu bahkan jauh lebih menarik”.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa peranan bahasa daerah dalam pengajaran sangat penting. Menurut Teori dari Swain (dalam Ellis, 1990) menyatakan bahwa

“interaksi dapat dihipotesiskan berkontribusi pada pemerolehan bahasa melalui dua cara. Pertama, melalui resepsi dan pemahaman anak atas bahasa yang digunakan oleh guru dan Kedua, melalui upaya anak memproduksi bahasa itu di dalam peristiwa pembelajaran”

Hasil ini merupakan sistematika pengajaran pendekatan komunikatif. Yang Tujuan pengajaran bahasa adalah menumbuhkan performansi komunikatif yang handal, sesuai dengan kebutuhan

komunikasi yang dimiliki oleh siswa dengan mempermudah maksud metode pembelajaran yang diberikan.

Untuk itu, Pemerintah Daerah dalam hal ini membuat suatu kebijakan sebagai solusi pemecahan dalam peningkatan mutu pendidikan. Dengan aspek-aspek yang mengikat sehingga dapat dijabarkan dalam kurikulum sekolah dasar tahun selanjutnya dengan maksud, bagaimana peningkatan pelayanan pendidikan bahasa daerah. Dalam pengaturan kebijakannya tentang peningkatan Pelayanan Pendidikan Bahasa Daerah, juga dibuatkan dalam peraturan daerah yang mengikat baik administrasi pendidikan. Pembiayaan maupun sanksi pidana apabila peraturan dimaksud tidak dapat dilaksanakan.

b. Pertimbangan / alasan dan Pendapat Dari Beberapa Pendidik

Bahasa Daerah seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945, merupakan Bahasa Daerah sebagai pendukung Bahasa Nasional. Bahasa daerah merupakan bahasa pendukung bahasa Indonesia yang keberadaannya diakui oleh Negara. UUD 1945 pada pasal 32 ayat (2) menegaskan bahwa “Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.” dan juga sesuai dengan perumusan Kongres Bahasa Indonesia II tahun 1954 di Medan, bahwa bahasa daerah sebagai pendukung bahasa nasional merupakan sumber pembinaan bahasa Indonesia. Sumbangan bahasa daerah kepada bahasa Indonesia, antara lain, bidang fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan kosa kata. Demikian juga sebaliknya, bahasa Indonesia

mempengaruhi perkembangan bahasa daerah. Hubungan timbal balik antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah saling melengkapi dalam perkembangannya.

Penjelasan uraian diatas merupakan suatu Amanah yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah. Sebagai Wakil Pemerintah dengan maksud bagaimana kebijakan yang dibuat oleh para penentu kebijakan dalam peningkatan pelayanan pendidikan khususnya Bahasa Daerah. Adapun beberapa alasan atau pertimbangan yang diangkat, berdasarkan kebijakan Pelayanan Pendidikan Bahasa Daerah. Yang diangkat dalam pembahasan ini dipaparkan oleh pemerintah daerah terkait, pendidik dan masyarakat lokal. Yang dominannya sangat merespon positif tentang bagaimana upaya Pemerintah Daerah membuat keputusan. Bagaimana meningkatkan mutu pendidikan khususnya pendidikan bahasa daerah yang hampir punah.

Menurut Bapak guru Martinus, S.Pd (Guru Smpn 2 lamasi) dalam mengemukakan pendapatnya menyatakan bahwa

“pendidikan bahasa daerah itu harus diajarkan dari tingkat sekolah menengah sampai kelas 3 dikarenakan menjadi dasar pengantar bahasa dalam interaktif komunikasi antara guru dan siswa, namun kenyataannya tidak terjadi demikian, sehingga harus direvisi ulang apa yang ada dalam kurikulum sekolah dari pemerintah, yang artinya bagaimana upaya pemerintah meningkatkan mutu pendidikan dan cepat tanggap karena ini kaitannya dengan penilaian budaya kita sendiri’.

Disisi respon tanggapan masyarakat menilai yang dalam hal ini menurut bapak Lambi (Petani/ Desa Bululondong) menyatakan bahwa: “saya sangat setuju bahasa daerah dalam pendidikan di sekolah menengah pertama harus ada, karena memperkaya bahasa dan kecintaan

adat istiadat daerah terjaga, jangan lupa dengan daerah sendiri, untuk itu sangat diharapkan perhatian Dinas Pendidikan”.

Kemudian adapun respon tanggapan menurut ibu Saripa (Wiraswasta/ Desa Seriti) mengatakan bahwa:

“ Bahasa Daerah perlu diajarkan disekolah, karena bahasa daerah merupakan bahasa ibu, jadi ada pengaruhnya untuk anak-anak ke depan. Kenapa mesti malu mau menerapkan karena itu merupakan identitas daerah kita sendiri.” Selanjutnya dari pertimbangan yang diwakilkan oleh bapak

Drs. H. Pahri, MM menyatakan bahwa:

“kami mengupayakan wacana ini dalam kurikulum pelajaran tahun berikutnya, dengan pertimbangan dan tanggapan yang saya ketahui. Namun hal ini tidaklah mudah, dikarenakan banyak factor pendukung harus dilihat dan menjadi dasar dan ditetapkan sebagai aturan dalam pembelajaran di sekolahsekolah.Khususnya Kabupaten Luwu dimana sudah tercakup semua yang ada di setiap daerah Kabupaten Luwu”.

Disela-sela pembicaraan yang didapatkan dari beberapa narasumber, ditarik suatu kesimpulan bahwa Kebijakan dalam Pelayanan Pendidikan bahasa Daerah ini sangat dibutuhkan.Tolak ukur pencapaian dalam peningkatan mutu pendidikan. Tidak mudah untuk secepatnya di realisasikan dalam dunia pendidikan apalagi dengan pertimbangan aturan yang ada, belum tentu dengan mudah dapat diakes ke sekolah.

2. Peningkatan bagi sekolah dasar yang membuat perangkat pembelajaran bahasa daerah (kurikulum)

Untuk menjamin tercapainya mutu pendidikan yang diselenggarakan di daerah, Pemerintah melalui Menteri Pendidikan Nasional telah menetapkan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan

Dasar Nomor 15 Tahun 2010 yang mana telah diperbaharui Nomor 23 Tahun 2013. Sebagai tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar, sekaligus sebagai acuan dalam perencanaan program dan penganggaran target masing-masing daerah kabupaten/kota.

Dalam tahapan yang ada, dalam standar pelayanan pendidikan dasar disebutkan bahwa Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diembannya. Guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis, mencoba mengkaji pada salah satu sekolah yang dalam hal ini, adalah Smpn 3 lamasi , Desa To'lemo. Yang masih melakukan proses belajar mengajar pendidikan bahasa daerah. Menurut pendapat ibu Hj. Wahyuni.S.Pd salah satu guru yang masih mengajar pendidikan bahasa daerah menyatakan bahwa:

“saya pribadi terpanggil untuk mengajarkan pendidikan bahasa daerah walau tidak seperti sekolah lain, ini juga masukan dari kepala sekolah saya sendiri karena kami menginginkan ada kemajuan dalam sector pendidikan bahasa daerah walau saya juga sebagai guru kelas yang mengajarkan pelajaran lain”.

Penjelasan dari Ibu *Hj. Wahyuni.S.Pd* Ini menggambarkan bahwa, pelayanan pendidikan tidak harus selalu menunggu peraturan yang ada dalam kurikulum. Apabila memang dibutuhkan dan dianggap perlu maka pelayanan pendidikan tentang bahasa daerah wajib. Ada mengingat Pendidikan Bahasa Daerah termasuk bagian dari pendidikan karakter bagi anak didik. Di pelajaran itu termuat berbagai hal yang akan

membentuk karakter anak, seperti sopan santun, dan tanggung jawab. Karena selain menjadi bagian dari pendidikan karakter, juga memberi pemahaman tentang nasional kebangsaan pada anak didik.

Pemetaan Pelajaran Bahasa Daerah yang sudah ada sejak tahun 2009 di Smpn 3 lamasi, Desa to'lemo Kecamatan Lamasi Timur. Telah membuat kurikulum mata pelajaran bahasa daerah dengan tahap per semester (Ganjil dan Genap), dimana Standar Kompetensi proses belajarnya adalah membaca, mendengarkan dan menulis.

Penjelasan dari Ibu Hj. Wahyuni.S.Pd menyatakan bahwa

“sekolah ini mengajarkan bahasa daerah suku bugis dan toraja, namun untuk bahasa bugis lengkap dengan lontara atau huruf penulisannya sedangkan untuk bahasa toraja hanya percakapan dan dialeknya saja”

Pelayanan pendidikan ini dapat kita contoh sebagai bukti keseriusan dalam dunia pendidikan. Karena kekurangan yang ada dalam peningkatan pelayanan, mampu mendorong terciptanya suatu proses mengajar yang mana tidak ada dalam kurikulum nasional. Disinilah letak suatu Kebijakan karena keputusan yang diambil sudah tepat dan menuju sasaran yang bertujuan meningkatkan mutu pendidikan. Dengan kata lain, sistem pendidikan nasional selalu menghadapi tantangan sesuai tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Sehingga perlu dilakukan pembaharuan secara terarah dan berkesinambungan. Agar dapat ditingkatkan kinerja dalam pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, relevansi, dan efisiensi serta manajemen pendidikan.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pelayanan Dasar

Pendidikan bahasa daerah di kab. Luwu

Dalam setiap pelaksanaan pelayanan publik tentunya ada hal-hal yang kemudian menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan pelayanan itu sendiri. Tentunya hal ini juga hadir bagi pemerintah daerah Kabupaten Luwu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam masalah pelayanan dasar di bidang pendidikan.

Dari hasil penelitian lapangan dan pustaka yang berkaitan dengan masalah pelayanan, penulis mendapatkan poin-poin yang dianggap penting dalam mempengaruhi proses pelaksanaan pelayanan dasar di bidang pendidikan. Beberapa poin tersebut antara lain ialah bagaimana tenaga pendidik pemberi pelayanan itu sendiri dalam memberikan pelayanan kepada anak didiknya. Selanjutnya ialah bagaimana tersedianya fasilitas ataupun sarana sebagai tempat dalam memberikan pelayanan kepada anak didik. Bagaimana pengalokasian anggaran ataupun biaya yang dapat dianggarkan dalam proses pendidikan bahasa daerah, pada Kurikulum Sekolah. Serta yang terakhir dukungan partisipasi pemerintah daerah dalam perumusan suatu keputusan atau kebijakan dalam penyelenggaraan pelayanan.

Beberapa poin ataupun faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya oleh penulis didapatkan pada saat melakukan wawancara dan dari membaca literature. Saat melakukan wawancara dengan Kepala Dinas

Pendidikan Kabupaten Luwu yaitu bapak Drs. M. Pahri, MM, beliau menyatakan bahwa

“ Secara umum bahwa proses pelaksanaan pelayanan di Kabupaten Luwu sangat dipengaruhi oleh beberapa hal, kondisi Kabupaten Luwu dan sekitarnya sebagai kabupaten yang terluas mengharuskan lahirnya wilayah-wilayah baru yang kemudian menjadi awal dari proses pelayanan itu, maksud saya bahwa dengan adanya daerah atau kecamatan-kecamatan baru pelayanan harus dimulai untuk masyarakat di sana, tentunya masalah pelayanan yang akan diberikan memerlukan tenaga personil, yang akan bekerja untuk memberikan pelayanan, sarana sebagai objek pelayanan dan yang tak kalah penting ialah biaya yang harus ada dalam proses pelayanan itu sendiri”.

Dari penjelasan tersebut jelas terurai mengenai hal-hal apa saja yang mempengaruhi dalam proses pelayanan. Dalam keputusan Menpan Nomor 63 tahun 2004, tentang standar dalam proses pelayanan itu sendiri. Diantaranya ada poin tentang kompetensi aparat dalam memberikan pelayanan, penyediaan sarana dan tersedianya biaya dalam proses pemberian pelayanan. Pembahasan untuk faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan pendidikan di Kabupaten Luwu akan dibahas secara satu persatu.

1. Tenaga Pendidik (Guru)

Tenaga pendidik merupakan suatu kebutuhan yang amat penting dalam menentukan maju tidaknya kualitas anak didik. Hal ini pun telah diatur dalam standar pelayanan minimal pendidikan di Indonesia untuk bagaimana kuantitas tenaga pendidik harus mencapai persentase yang dibutuhkan oleh setiap satuan pendidikan. Lebih lanjut seperti yang

diatur dalam PP Nomor 47 tentang wajib belajar 9, tahun bahwa pemerintah daerah menjamin tersedianya tenaga pendidik. Tenaga pendidik yang dimaksudkan di sini ialah keberadaan guru dalam upaya memberikan bimbingan kepada peserta didik.

Kekurangan tenaga didik yang mengajarkan bahasa daerah disekolah menengah pertama masih banyak dijumpai, sehingga ini menjadi polemic terbesar bagaimana meningkatkan mutu pendidikan. Pada pembahasan ini akan dibahas mengenai pengadaan tenaga pendidik dilihat dari tingkat pendidikan dari tenaga pendidik dalam hal ini guru, selanjutnya akan dibahas mengenai kualitas tenaga pendidik (guru) itu sendiri.

Untuk melihat tingkat pendidikan para guru berikut khususnya Guru Bahasa Daerah akan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 10. Data Guru Bahasa Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan Di Kecamatan Lamasi

DESA	SMP	JUMLAH GURU	STATUS KEPEGAWAIAN		MEMILIKI GURU BAHASA DAERAH
Lamasi	Smpn 1 lamasi	17	PNS HONOR	6 11	-
bululondong	Smpn 2 lamasi	11	PNS HONOR	4 7	-
To'lemo	Smpn 3 lamasi	15	PNS HONOR	8 7	1
Pompengan	Smpn 4 lamasi	17	PNS HONOR	4 13	-

Sumber : Olahan Data Sekunder 2017

Dari data yang ada dapat dilihat bahwa jumlah guru yang ada di Kecamatan Lamasi pada tahun 2017 adalah sebanyak 60, sedangkan kepala sekolah yang ada ialah 4. Dari hasil data yang ada dapat dilihat bahwa guru dan kepala sekolah yang ada sangat kurang. Namun untuk mengetahui lebih pasti apakah jumlah yang ada sudah mencukupi atau belum, dari hasil wawancara penulis dengan kepala dinas pendidikan Kabupaten Luwu bapak Drs. M. Pahri, MM, beliau menyatakan bahwa:

“ Untuk kabupaten luwu saat ini masih kekurangan guru, khususnya guru mata pelajaran Bahasa Daerah, tentunya diharapkan agar penerimaan pegawai selanjutnya diharapkan guru mata pelajaran Bahasa Daerah banyak diterima’.

Penjelasan kepala Dinas pendidikan kabupaten luwu tergambar bahwa guru yang ada di kabupaten luwu masih belum mencukupi. Itu artinya masalah kurangnya guru menjadi salah satu kendala yang dihadapi dalam proses pelayanan dasar bidang pendidikan di kabupaten luwu. Lantas bagaimana dengan kualitas dari tenaga pendidik itu sendiri? untuk melihat masalah ini penulis menampilkan tabel 11 dari tanggapan masyarakat tentang bagaimana guru dalam mendidik murid di sekolah.

Tabel 11. Tanggapan Masyarakat Mengenai Guru Telah Mendidik Murid Dengan Baik

Wilayah	Guru Telah Mendidik Murid Dengan Baik		
	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
Sinangkal	2 6,6%	1 3,3%	2 6,6%

To'lemo	0 0%	2 6,6%	3 10%
Bululondong	1 3,3%	1 3,3%	1 3,3%
Pelalan	1 3,3%	1 3,3%	1 3,3%
Total	4 13,2%	5 16,5%	7 23,2%

Sumber : Olahan Data Primer 2017 (kuisisioner)

Dari tabel 11 menunjukkan bahwa, dari 9 responden yang ada di empat desa mendapatkan skor rata-rata 1.78 yang masuk dalam kategori sedang. Namun jika melihat persentase pada setiap kategori yang ada menunjukkan bahwa 16,5% atau 5 orang menyatakan bahwa guru telah mendidik murid dengan baik. Bahkan 23,2% atau 7 orang menyatakan guru telah mendidik murid dengan sangat baik. 13,2% atau 4 orang lainnya menyatakan kurang setuju.

Dari olahan data didapatkan bahwa, mereka yang beranggapan guru telah mendidik murid dengan baik. Menyatakan alasannya bahwa, murid telah menjadi pintar dan memiliki prestasi yang bagus di sekolahnya. Ketersediaan guru dalam jumlah banyak tentunya sangat memudahkan bagi anak didik dalam menerima pelajaran, dan berdampak pada kemudahan guru sendiri dalam mengontrol murid-muridnya. Namun yang perlu diperhatikan ialah bukan hanya jumlah guru yang harus ditambah tetapi kualitas guru dalam mendidik agar ditingkatkan lagi. Oleh karena itu penulis beranggapan bahwa

aparatus (guru) sangat menentukan dalam menyelesaikan pelayanan dasar pendidikan di kabupaten Luwu. Yang di khusukan pada daerah penulis adalah kecamatan Lamasi Timur yang dalam tahap pembahasan ini adalah pemberdayaan peningkatan bahasa daerah, guna terciptanya budaya yang tidak hilang.

2. Sarana prasarana

Seperti yang telah dijelaskan pada pelayanan dasar pendidikan mengenai masalah sarana dan prasarana. Bahwa poin lain yang harus hadir dalam proses pelayanan itu sendiri ialah bagaimana keberadaan sarana, sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pelayanan itu sendiri. Faktor sarana yang baik dengan memiliki fasilitas yang lengkap, juga akan mempengaruhi baik tidaknya pelayanan yang tentunya akan dinilai oleh masyarakat.

Sarana yang dimaksud dalam pelayanan dasar pendidikan tentu saja ialah sekolah sebagai sarana bagi siswa-siswi dalam memperoleh pendidikan. Jumlah sarana dan kelengkapan fasilitas sangat mempengaruhi dalam proses pemberian pelajaran kepada para peserta didik. Untuk mengetahui jumlah sarana yang ada di kecamatan Lamasi Timur dapat dilihat pada tabel 12 berikut ini.

Tabel 12

Jumlah Sekolah dan jumlah Siswa Kecamatan Lamasi Tahun 2017

NO	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid
1	SMPN 1 LAMASI	131 Siswa

2	SMPN 2 LAMASI	271 Siswa
3	SMPN 3 LAMASI	224 Siswa
4	SMPN 4 LAMASI	257 Siswa
Jumlah	4 Sekolah	883 Siswa

Tabel 12 menunjukkan bahwa jumlah sekolah secara

keseluruhan menurut jenis tingkatan pendidikan berjumlah 4 sekolah.

Dari data yang didapatkan bahwa sekolah yang ada masih kurang banyak, dari hasil wawancara dengan kepala sekolah Smpn 3 lamasi bapak Amiruddin, S.pd ketika ditanyakan masalah, beliau menyatakan bahwa:

“Untuk jumlah sekolah yang ada saat ini sangat kurang yang ada di kecamatan lamasi timur. Walau dalam tahap sampai ini, sudah memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena dilihat dari jumlah penduduk yang ada di kecamatan lamasi timur, namun begitu jika ada anggaran untuk membangun sekolah, karena pasti akan selalu diadakan”.

Dari pernyataan bapak kepala sekolah Smpn 3 lamasi bapak Amiruddin, S.Pd tergambar bahwa jumlah sekolah yang ada saat ini sudah mencukupi. Yang kemudian mengindikasikan bahwa, sarana sudah menjadi pendukung dalam proses pelayanan dasar pendidikan yang diadakan di Kecamatan Lamasi.

3. Anggaran (dana)

Masalah anggaran sangat menentukan dalam berhasil tidaknya suatu kegiatan yang dilaksanakan. Begitupun dengan pelayanan dasar

pendidikan di kecamatan lamasi timur. Dimana masalah anggaran menentukan segala program kerja yang dimana disusun oleh pemerintah daerah setempat. dari hasil wawancara dengan kepala dinas pendidikan Kabupaten Luwu Drs. M. Pahri, MM, beliau menyatakan bahwa

“Untuk masalah anggaran, pemerintah daerah tiap tahunnya selalu meningkatkan untuk bidang pendidikan untuk memenuhi standar nasional pendidikan. dana yang diperoleh selama ini berasal dari pemerintah pusat melalui dana alokasi khusus, APBD provinsi dan APBD kabupaten”

Dari pernyataan beliau dapat ditarik kesimpulan bahwa, untuk pos anggaran di bidang pendidikan di kabupaten luwu tiap tahunnya selalu diadakan penambahan. Hal ini mengindikasikan bahwa untuk masalah anggaran tetap mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah dalam upaya pelayanan pendidikan bagi seluruh masyarakat. Namun yang didapat dilapangan saat observasi langsung, anggaran untuk perekrutan tenaga didik masih kurang. Dan penempatan tenaga didik masih lebih banyak ditempatkan di lokasi terdekat, dibandingkan ditempatkan di daerah terpencil. Serta penambahan perekrutan guru dibidang khusus, masih jarang di rekrut untuk di angkat sebagai PNS. Yang dalam hal ini Guru Bahasa Daerah, untuk itu perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah.

4. Pelaksanaan Kurikulum

Dalam rangka mempersiapkan lulusan pendidikan, memasuki era globalisasi yang penuh tantangan dan ketidakpastian. Diperlukan pendidikan yang dirancang berdasarkan kebutuhan nyata di

lapangan. Untuk kepentingan tersebut, pemerintah memprogramkan Kurikulum sebagai acuan dan pedoman bagi pelaksanaan pendidikan untuk mengembangkan berbagai ranah pendidikan (pengetahuan, keterampilan dan sikap). Dalam seluruh jenjang dan jalur pendidikan, khususnya pada jalur pendidikan sekolah.

Kurikulum adalah suatu konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan kemampuan, melakukan (kompetensi) tugas-tugas dengan standar performansi tertentu. Sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik, berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu. Dengan demikian implementasi kurikulum dapat menumbuhkan tanggung jawab, dan partisipasi peserta didik. Untuk belajar menilai serta memberanikan diri berperan serta dalam berbagai kegiatan, baik di sekolah maupun di masyarakat.

Kurikulum memberikan keleluasaan kepada sekolah, untuk menyusun dan mengembangkan silabus mata pelajaran sesuai dengan potensi sekolah, kebutuhan dan kemampuan peserta didik serta kebutuhan masyarakat di sekitar sekolah. Silabus dikembangkan di tiap sekolah, sehingga dimungkinkan beragamnya kurikulum antarsekolah atau wilayah. Tanpa mengurangi kompetensi yang telah ditetapkan dan berlaku secara nasional (standar nasional).

Dengan adanya penciptaan Kurikulum di Kabupaten yang dalam hal ini, diberi otonomi untuk mengembangkan apa yang menjadi kebutuhan daerah. Untuk memenuhi kurikulum yang akan diangkat pada tahun pembelajaran. Selanjutnya penulis mengharapkan bahwa,

terselenggaranya mutu pendidikan yang baik agar mencapai semua aspek pendidikan. Tidak membeda-bedakan hasil pelaksanaan pendidikan, namun bagaimana mencari solusi dan cara agar lebih meningkat dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya.

Hal senada dikemukakan oleh salah seorang guru yang dalam hal ini mengajar pendidikan bahasa daerah ibu Hj. Wahyuni.S.Pd

“ walau tidak sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan, namun karena kecintaan budaya, maka sekolah Smpn 3 lamasi, yang masih mengajar bahasa daerah dengan maksud mempertahankan tradisi budaya yang ada. Walau itu dengan keterbatasan tenaga didik, yang merangkap pekerjaan baik sebagai guru kelas maupun guru khusus yang dalam hal ini guru bahasa daerah”.

Dari penjelasan ibu Hj. Wahyuni.S.Pd Dapat kita tarik kesimpulan bahwa apabila keterbatasan yang ada tidaklah menjadi halangan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Ini menjadi contoh bagi daerah lain agar kultur budaya kita terpelihara dengan melakukan pelayanan pendidikan bagi sekolah. Dan bagaimana pemerintah daerah meningkatkan kesetaraan tenaga didik serta menyediakan lapangan pekerjaan melalui pengangkatan PNS, terkhusus untuk Guru Bahasa Daerah.

5. Partisipasi masyarakat dan dukungan Pemerintah Daerah

Dari segi partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan dapat dilihat dari angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM).Data terakhir pada tahun 2008-2009 menunjukkan bahwa untuk

tingkat sekolah menengah (Smp), angka partisipasi kasar mencapai 46.61%, sedangkan angka partisipasi murni mencapai 39.55%.

Dari data yang ada menunjukkan bahwa terjadi peningkatan partisipasi anak-anak didik rata-rata 20-40%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah Kabupaten Luwu dalam meningkatkan angka untuk siswa yang masuk ke sekolah cukup baik. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Kepala Dinas pendidikan Bapak Drs. M. Pahri, MM yang menyatakan bahwa, salah satu upaya yang dilakukan dinas pendidikan saat ini ialah mendorong para orang tua untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Tentunya hal ini merupakan hal positif bagi pemerintah daerah Kabupaten Luwu dan seluruh Kecamatan yang harus terus ditingkatkan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pada Bab IV telah diuraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang pelaksanaan pelayanan pendidikan di Kabupaten Luwu khususnya penempatan lokasi Penelitian yaitu Kecamatan Lamasi Timur Provinsi Sulawesi Selatan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya.. Dalam bab ini penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan serta saran-saran yang berhubungan dengan hasil penelitian.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dibahas pada bab 4 tentang bagaimana pelaksanaan pelayanan pendidikan di Kecamatan Lamasi Timur, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya maka penulis menyimpulkan :

1. Pelaksanaan pelayanan dasar dalam bidang pendidikan di Kabupaten

Luwu, khususnya penempatan lokasi Penelitian yaitu di Kecamatan Lamasi Timur. Secara keseluruhan pelayanan dasar dalam bidang pendidikan melalui peningkatan pelayanan pendidikan bahasa daerah di Kecamatan Lamasi Timur, masih belum maksimal atau masih kurang. Hal ini tentu saja berdasarkan dari hasil olahan data dari setiap pembahasan yang dijadikan indikator dalam menilai. Meskipun begitu, penulis mengakui bahwa terjadi perubahan yang lebih baik dibidang pendidikan di Kecamatan Lamasi Timur seperti banyaknya prestasi yang telah didapatkan selama ini oleh pemerintah daerah di Kecamatan Lamasi Timur. Sekalipun

2. hal itu tidak bisa diukur untuk menjadikan pelayanan pendidikan di Kecamatan Lamasi Timur dikarenakan masih banyak hal yang menjadi kekurangan yang harus segera dibenahi ke depannya.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan dasar dalam bidang pendidikan di Kabupaten Luwu khususnya penempatan lokasi Penelitian yaitu Kecamatan Lamasi Timur Provinsi Sulawesi Selatan. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, didapatkan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan dasar dalam bidang pendidikan di Kabupaten Luwu. Yang dalam hal ini lokasi penelitian yaitu Kecamatan lamasi Timur yakni :
 - a. Tenaga Didik (Guru)

Untuk pelayanan dasar bidang pendidikan dari hasil olahan data menunjukkan bahwa jumlah tenaga pendidik yang ada saat ini dianggap masih kurang khususnya, guru mata pelajaran Bahasa Daerah. penambahan guru akan terus diadakan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Luwu dan seluruh daerah Kecamatan. Dengan jumlah guru ataupun tenaga pendidik yang masih kurang saat ini, menjadi salah satu kendala dalam pemberian pelayanan pendidikan di Kabupaten Luwu.

- b. Sarana dan Prasarana

Untuk pelayanan dasar bidang pendidikan dengan melihat jumlah sekolah dan hasil wawancara dengan Kepala dinas pendidikan.

Didapatkan kesimpulan bahwa jumlah sarana dalam hal ini, sekolah-

sekolah sudah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. olehnya itu dapat disimpulkan bahwa dengan jumlah sarana atau sekolah yang saat ini sudah mencukupi menjadi salah satu faktor pendukung bagi pemerintah daerah Kabupaten Luwu. Khususnya penempatan lokasi Penelitian yaitu Kecamatan Lamasi Timur Provinsi Sulawesi Selatan dalam memberikan pelayanan kepada anak didik.

c. Anggaran (Dana)

Untuk bidang pendidikan anggaran yang tersedia selalu ditingkatkan tiap tahunnya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu, dengan berdasar itu dapat dikatakan bahwa masalah anggaran yang mendapat perhatian yang baik dari pemerintah daerah setempat. Terutama penyediaan perekrutan tenaga didik yang handal menjadikan ini sebagai faktor pendukung dalam rangka pelaksanaan pelayanan dasar pendidikan di

Kabupaten Luwu, khususnya penempatan lokasi Penelitian yaitu Kecamatan Lamasi Timur.

d. Partisipasi masyarakat dan dukungan Pemerintah Daerah

Untuk bidang pendidikan tingkat partisipasi masyarakat dapat dilihat dari tingkat APK dan APM. Untuk siswa siswi menengah mencapai persentase 20-40%, yang menunjukkan bahwa partisipasi Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak mereka cukup baik.

B. Saran-Saran

1. Pelayanan dasar adalah hal dasar atau yang mutlak harus segera dipenuhi dalam rangka upaya pemuasan terhadap masyarakat. pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan tentunya merupakan pelayanan yang penting bukan hanya untuk Kabupaten Luwu, khususnya penempatan lokasi

Penelitian yaitu Kecamatan Lamasi Timur Provinsi Sulawesi Selatan.

Tetapi bagi seluruh daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan IPM bagi suatu daerah, olehnya itu pemerintah daerah khususnya, Pemerintah daerah Kabupaten Luwu. Diharapkan untuk lebih aktif dalam meningkatkan pelayanan kepada seluruh masyarakat, sehingga konsep kesejahteraan rakyat dapat segera terpenuhi.

2. Langkah-langkah konkrit yang hendaknya dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Luwu. Dalam pemberian pelayanan baik itu pelayanan pendidikan ialah dengan jalan perbaikan fasilitas, ataupun penambahan sarana prasarana, penyediaan sumber daya manusia yang handal tentu saja dengan menyaring tenaga-tenaga yang berkualitas, penyediaan anggaran dalam menopang seluruh kegiatan pelayanan secara umum. jika semuanya itu dapat tercapai, paling tidak akan merubah hasil pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik.
3. Masyarakat diharapkan ikut berperan aktif dalam upaya pembangunan daerah secara umum dan secara khusus. Bagaimana menempatkan posisi dalam proses pelayanan, tentunya dengan jalan selalu mendukung program-program pemerintah daerah Kabupaten Luwu dan Daerah sekitarnya yang bersifat positif dan ikut berpartisipasi di dalamnya. Sehingga terjalin satu

persatuan hubungan yang harmonis yang nantinya akan melahirkan satu titik keseimbangan yang akan berdampak kepada kemajuan daerah.

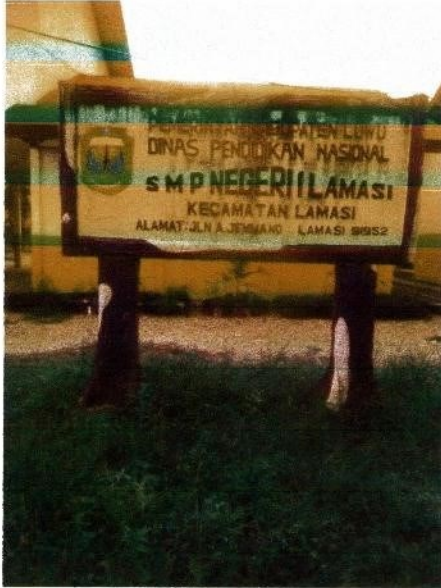
DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal .2004. *Kebijakan Publik*. Edisi Revisi. Jakarta: Yayasan Pancur Alwi, Hasan.2001. *Kebijakan Bahasa Daerah*. Jakarta: Pusat Bahasa
- Chan dan Sam. 2010. *Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah Cetakan ke-5*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dunn. 2000.Konsepotonomidaerah. [http://dunn.wordpress.com/2000/09/12/ Konsep-otonomi-daerah. Html Media](http://dunn.wordpress.com/2000/09/12/Konsep-otonomi-daerah.Html-Media) (Diakses pada tanggal 26 Februari 2017).
- Ellis. 1990. "*Bahasa Daerah, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Asing dalam Percepatan Realisasi Pendidikan Berkelanjutan bagi Anak Indonesia* " Dalam seminar internasional Bahasa dan pendidikan Anak Bangsa. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Fisman, Joshua Arthur. 1996.BahasadanKuasa:
[http://josman.wordpress.com/1996/09/12/ Bahasa-dan-Kuasa. Html. Media](http://josman.wordpress.com/1996/09/12/Bahasa-dan-Kuasa.Html-Media) (Diakses pada tanggal 27 Februari 2017).
- Hasbullah, 2006. *Kebijakan Otonomi Daerah dan Implementasi Terhadap pelayanan* . PT. Bina Aksara. Jakarta.
- Hanida, Putri Rozidateno.2009. "*Penguatan Peran Masyarakat Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik.*"
[http://ozidateno. wordpress. com/2009/01/2 7/penguatan-peran-masyarakat-dalamproses-perumusan-kebijakan-publik/](http://ozidateno.wordpress.com/2009/01/27/penguatan-peran-masyarakat-dalamproses-perumusan-kebijakan-publik/) (Diakses pada tanggal 23 Desember).
- Irianto, Yoyon Bahtiar. 2011. *Kebijakan Pembaharuan Pendidikan*. PT. Ikrar Mandiri Abadi. Jakarta.
- Keraf, Gorys.1997. *Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa*. Ende-flores: Nusa Indah
- Kepmenpan. Nomor 6.1 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan,
- Moeliano, Aflon. 1 98 1 . *Pengembangan dan Perahinaan Bahasa*. Jakarta; Jambatan
- Moenir, H.A.S. 1998. *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara

- Miftah, Thoha (1995). *Perilaku Organisasi Konsep Dasar Dan Aplikasinya*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, Feriyal Akbar. 2010. *Analisis Pelaksanaan Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan dan Pendidikan di Kabupaten Mamuju Utara Sulawesi Barat*. Skripsi diterbitkan. Makassar: Universitas Hasanuddin (UNE1AS),
- Nazir, Muhammad 998.SPSS Versi 10: Mengolah Data statistika secara Profesional Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Prasaja, Setya Amrih. 2001. *Proses Pembelajaran Bahasa Daerah di Ramping Bahasa Indonesia*
- [http://prasaja.wordpress.com/2001/05/07/Proses Pembelajaran- Bahasa- Daerah di Samping -Bahasa -Indonesia](http://prasaja.wordpress.com/2001/05/07/Proses-Pembelajaran-Bahasa-Daerah-di-Samping-Bahasa-Indonesia). *Html. Media Online* (Diakses pada tanggal 29 Desember).
- Peraturan Perundang-Undangan RI Nomor 12 tahun 20DS Tentang Otonomi Daerah. Jakarta; Mendiknas.
- Rahmaniar, 2011. Implementasi Kebijakan Kurikulum Muatan Lokal (Studi Kasus di SLTP NEG, 2 PARE-PARE:RSBI)". Skripsi diterbitkan. Makassar: Universitas
- Ratminto & Winarsrh A,s, 2006. *Manajemen Pelayanan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sofa, Pakde, 2Q08;>Kajian Ilmu Kebijakan dan Pengertian Kebijakan". <http://massofa.wordpress.com.2017/02/13/kajian-ilmu-kebijakan-danpengertian-kebijakan/>(Diakses pada tanggal 23 Februari 2017
- Sutopo. 2009. *Pelayanan Prima*. Lembaga Administrasi Negara. Jakarta
- Sunaryo. 2000. Bahasa Sastra Dalam Gamitan Pendidikan. Bandung : Diponegoro
- Sugiyono.2010. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R &D*. Bandung :Alfabeta.

- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2006. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Syarifuddin, Ateng. 1991. *Titik Berat Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II dan Perkembangannya*. Mandar Maju, Bandung,
- Tilaar.H.A.R.2004.*Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tim Penyusun Kamus Depdikbud. 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesi*. Jakarta: Depdikbud dan Balai Pustaka
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 & 24 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan & Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan*. 2010. Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri.
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Bumi Karsa.
- Undang-undang RI Nomor. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah
- Umiarso. Dkk,2010. *Manajemen Mutu Sekolah di Era Otonomi Daerah*. Jogjakarta: IRCiSod.
- Widjaja, A.W.2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Wikipedia," *Pengertian Pendidikan*.". [http: // ms. wikipedia.org/wiki/2009/10/26/pengertian-pendidikan](http://ms.wikipedia.org/wiki/2009/10/26/pengertian-pendidikan)(Diakses pada tanggal 26 Februari 2017)
- [http://bloggerbekasi.com/2010/02/26/terancamnya - bahasa - daerah](http://bloggerbekasi.com/2010/02/26/terancamnya-bahasa-daerah). Html online. (Diakses pada tanggal 27 Desember)

SMPN 1 LAMASI KABUPATEN LUWU





(Wawancara Dengan Ibu ST. QIDAH Salah Satu Staf PNS Dinas Pendidikan kabupaten Luwu)

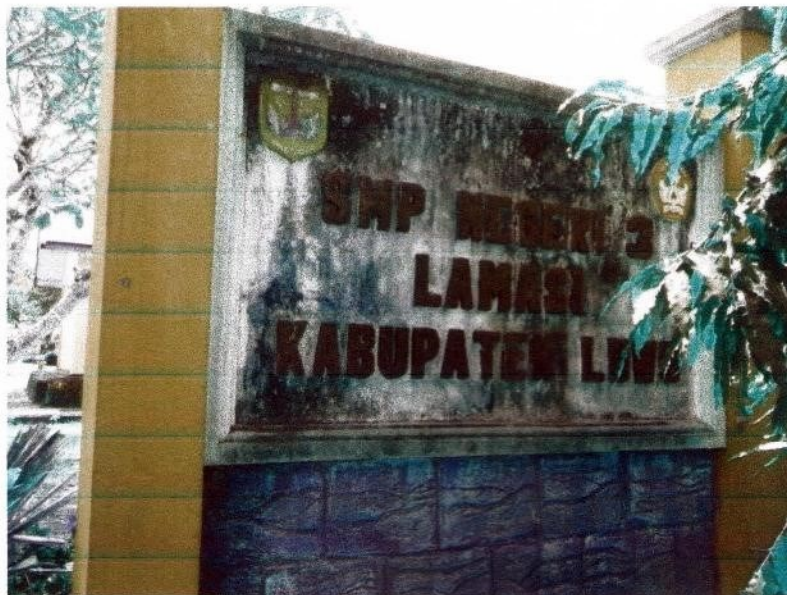


(Wawancara Dengan Bpk MASNUR Salah Satu Staf PNS Dinas Pendidikan kabupaten Luwu)

SMPN 2 LAMASI KABUPATEN LUWU



SMPN 3 LAMASI KABUPATEN LUWU



SMPN 4 LAMASI KABUPATEN LUWU





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
FAKULTAS BAHASA DAN SASTRA

Alamat : Kampus Parangtambung UNM Jalan Daeng Tata Makassar, 90224
Telepon (0411) 863540, 861508, 861509, 861510 Faksimile (0411) 861508
Laman : <http://fbs.unm.ac.id>

USUL JUDUL PENELITIAN

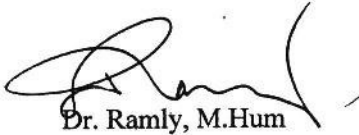
1. Nama Mahasiswa : Iin Horryzha H.
2. NIM : 1555045035
3. Program Studi : Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah
4. Tempat, Tanggal Lahir : Batu Merah, 18 Juni 1993
5. Judul-judul yang diajukan :
 - 5.1. Kebijakan pelayanan pendidikan mata pelajaran bahasa daerah tingkat SMP Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu.
 - 5.2. Kemampuan menulis puisi bahasa Toraja pada siswa kelas VIII di SMP Negeri 2 Sopai Kab. Toraja Utara
 - 5.3. Kemampuan menyimak cerita legenda di tanah Luwu pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Lamasi.

Makassar, 16 Desember 2016


Mengetahui:
Ketua Prodi Pendidikan BD


Prof. Dr. H. Johar Amir, M.Hum
NIP 19600919 198601 2 001

Disetujui oleh:
Penasihat Akademik,


Dr. Ramly, M.Hum
NIP 19590616 198601 1002

Mahasiswa yang
bersangkutan,


Iin Horryzha H.
NIM1555045035

PERSETUJUAN PIMPINAN JURUSAN

1. Judul yang disetujui:


.....
.....
.....
.....

2. Dosen yang ditugasi menjadi pembimbing skripsi:

Pembimbing I : Dr. Ramly, M. Hum NIP 195906161986011002
Pembimbing II : Dr. Y. Salam, M. Pd NIP 196306281989031002

Makassar, 14 Desember 2016

Mengetahui,
Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra
Indonesia


Dr. Ramly, M. Hum
NIP 19590616 198601 1002

Tembusan:

1. Jurusan
2. Kasubag Pendidikan
3. Penasihat Akademik
4. Mahasiswa yang Bersangkutan



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
FAKULTAS BAHASA DAN SAstra

Kampus UNM Parangtambung, Jalan Daeng Tata Raya Makassar 90224
Telepon: (0411) 861508, 861509, 861510 Faksimile: (0411) 861508
Email: Jbsi.fbs.unm@gmail.com laman: www.jbsiunm.ac.id - www.unm.ac.id

Nomor: - 7390/UN36.5.2/EP/2016

19 Desember 2016

Lamp. : 1 lembar

Hal : **Permohonan untuk menjadi Pembimbing/Konsultan Penulisan Skripsi**

Yth. : 1. Dr. Ramly, M.Hum
2. Dr. Salam, M.Pd

Di
Makassar

Dengan hormat,

Bapak/Ibu diharapkan bersedia menjadi Pembimbing/Konsultan Penulisan Skripsi mahasiswa:

Nama : Iin Horryzha H.
NIM : 1555045035
Jurusan : Bahasa dan Sastra Indonesia
Program Studi : Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah
Judul Skripsi :
"Kebijakan Pelayanan Pendidikan Mata Pelajaran Bahasa Daerah Tingkat SMP
Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu"

Atas kesediaan Bapak/Ibu, diucapkan terima kasih.

Ketua Jurusan
Bahasa dan Sastra/Indonesia,

Dr. Ramly, M.Hum.
NIP 19590616 198601 1 002

1. Bersedia/~~Tidak Bersedia~~
Sebagai Pembimbing I

(.....)
Dr. Ramly, M.Hum.

2. Bersedia/~~Tidak Bersedia~~
Sebagai Pembimbing II

(.....)
Dr. Salam, M.Pd



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

FAKULTAS BAHASA DAN SAstra

Alamat : Kampus Parangtambung UNM Jalan Daeng Tata Makassar, 90224

Telepon (0411) 863540, 861508, 861509, 861510 Faksimile (0411) 861508

Laman : <http://fbs.unm.ac.id>

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SAstra

NOMOR: 7369/UN36.S/EP/2016

Tentang
PENGANGKATAN KOMISI PEMBIMBING

A.n. **Iin Horryzha H.**

Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia

Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah

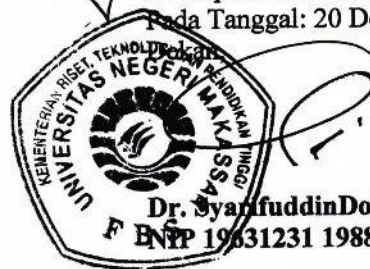
DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SAstra

- Membaca : Permohonan pengesahan susunan pembimbing bagi mahasiswa.
- Menimbang : a. Bahwa untuk memperlancar penulisan skripsi bagi mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya, maka dianggap perlu mengangkat komisi pembimbing
b. Bahwa maksud tersebut pada sub a di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah : No. 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden : No. 93 Tahun 1999;
4. Keputusan Presiden : No. 242/M/Tahun 2003;
5. Keputusan Mendikbud 94860/A2.1.2/KP/1998;
6. Keputusan Mendikbud No. 20/P/1999;
7. Keputusan Mendikbud No. 227/O/1999;
8. Keputusan Mendiknas No. 025/O/2002;

MEMUTUSKAN

- Pertama : Mahasiswa yang bernama **Iin Horryzha H.**, NIM 1555045035, Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah, telah memenuhi semua persyaratan pengajuan rencana skripsi dengan judul "Kemampuan Kebijakan Pelayanan Pendidikan Mata Pelajaran Bahasa Daerah Tingkat SMP Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu".
- Kedua : Susunan Komisi Pembimbing tersebut terdiri dari:
1. Dr. Ramly, M.Hum (Pembimbing I)
2. Dr. Salam., M.Pd. (Pembimbing II)
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Makassar
pada Tanggal: 20 Desember 2016



Dr. Syarifuddin Dollah, M.Pd.
F ENTP 19631231 198803 1 029

Tembusan:

1. Rektor Universitas Negeri Makassar
2. Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia
3. Penasihat Akademik Mahasiswa yang bersangkutan
4. Pembimbing I
5. Pembimbing II



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
FAKULTAS BAHASA DAN SAstra

Kampus Parangtambung UNM Jalan Daeng Tata Makassar 90224

Telepon (0411) 861508, 861509, 861510, 863540

Jbsi.fbs.unm@gmail.com - www.jbsiunm.ac.id - www.unm.ac.id

Nomor : 2074/UN36.5.2/EP/2017

27 Februari 2017

Lamp. : satu rangkap naskah Proposal penelitian

Hal : Penugasan/Undangan Seminar Proposal Penelitian

Yth.

1. Dr. Ramly, M.Hum.
2. Dr. Salam, M.Pd.
3. Dr. Syamsudduha, M.Hum.
4. Hajrah, S.S., M.Pd.

Makassar

Kami mengundang dengan hormat Bapak/Ibu/Saudara untuk menghadiri Seminar Proposal Penelitian mahasiswa Program Pendidikan Guru Bahasa dan Sastra Daerah atas nama:

No.	Nama Mahasiswa Nomor Stambuk	Panitia Seminar Proposal Penelitian
1.	Iin Horryzha 1555045035	1. Ketua/Pembimbing I : Dr. Ramly, M.Hum. 2. Sekretaris/Pembimbing II : Dr. Salam, M.Pd. 3. Penguji I : Dr. Syamsudduha, M.Hum. 4. Penguji II : Hajrah, S.S., M.Pd.

Yang insya Allah akan dilaksanakan pada :

hari/ tanggal : Senin, 20 Maret 2017

waktu : 10.00-12.00 wita

tempat : Ruang Seminar (DG 106 Lantai 1) FBS

Mengingat pentingnya Seminar Proposal Penelitian ini, diharapkan kehadiran Bapak/ Ibu/ Saudara tepat waktu.

Atas kehadiran Bapak/Ibu/Saudara, diucapkan terima kasih.



Ketua Jurusan BSI,

Dr. Muhammad Saleh, S.Pd., M.Pd.

NIP 197512312000031001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
FAKULTAS BAHASA DAN SAstra
Kampus Parangtambung UNM Jalan Daeng Tata, Makassar, Kode Pos 90224
Telepon (0411) 861508, 861509, 861510, 863540

TANDA TERIMA UNDANGAN SEMINAR PROPOSAL
MAHASISWA JURUSAN BAHASA DAN SAstra INDONESIA FBS UNM

Nama : Iin Horryzha Hatta
NIM : 1555045035
Program Studi : SI Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah
Judul proposal : Kebijakan Pelayanan Pendidikan Bahasa Daerah Tingkat SMP di Kabupaten Luwu

No	Nama Dosen	Tanggal Terima Undangan	Kesediaan (√)		Tanda Tangan	KET
			Bersedia	Tidak Bersedia		
1.	Dr. Ramly, M.Hum.	18 Maret 2017	√	√		
2.	Dr. Salam, M.Pd.	18 Maret 2017	√	√		
3.	HAJRAH, S. S., M.Pd	18 Maret 2017	√	√		
4.	Abd Haliq, S.Pd., M.Pd.	18 Maret 2017	√	√		

Makassar, 18 Maret 2017

Ketua Jurusan Bahasa Dan Sastra Indonesia

Dr. Muhammad Saleh, S.Pd., M.Hum.
NIP 197512312000031001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
FAKULTAS BAHASA DAN SAstra

Kampus Parangtambung UNM, Jalan Daeng Tata, Makassar, Kode Pos 90224
Telepon (0411) 861508, 861509, 861510, 863540

SARAN PEMBIMBING/PENGUJI PADA SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN

Nama Mahasiswa : IIN FORESTIA FEATTA
NIM : 1555 045035
Program Studi : PENDIDIKAN BAHASA DAN Sastra Daerah
Judul Penelitian : KEBERAFAN PELAYANAN PENDIDIKAN BAHASA Daerah
TINGKAT SMP Di kec. Lamasi Kab. Luwu

Saran-Saran:

- = Fungsi kembali judulnya
- = Berikan fokus yang anda ingin lakukan
- = Pergeslah tujuan yang ingin dicapai

Makassar, 20/03-2017
Penguji/Pembimbing,

H. A. H. H.

Catatan:

Lembar saran ini dilampirkan pada skripsi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
FAKULTAS BAHASA DAN SASTRA
Kampus Parangtambung UNM, Jalan Daeng Tata, Makassar, Kode Pos 90224
Telepon (0411) 861508, 861509, 861510, 863540

SARAN PEMBIMBING/PENGUJI PADA SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN

Nama Mahasiswa : Lin Heryzka Featra
NIM : 1555045035
Program Studi : PENDAFAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH
Judul Penelitian : KEBIJAKAN PELAYANAN PENDIDIKAN BAHASA DAERAH
TINGKAT SMP DI KEC. LAMASI KAB. LUWU

Saran-Saran:

- Atungin kembali judulnya.
- Usahakan yang diteliti hanya satu
komponen saja. misalnya: guru atau staff
saja.
- Benahi kembali proposalnya.

Makassar, 23/3/2019
Penguji/Pembimbing,

Abdul Halim

Catatan:

Lembar saran ini dilampirkan pada skripsi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
FAKULTAS BAHASA DAN SASTRA

Kampus Parangtambung UNM, Jalan Daeng Tata, Makassar, Kode Pos 90224
Telepon (0411) 861508, 861509, 861510, 863540
Jbsi.fbs.unm@gmail.com – www.jbsiunm.ac.id – www.unm.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

PERSETUJUAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN
MAHASISWA JURUSAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH

Nama : IIN HORRYZHA. H
NIM : 1555045035
Program Studi : Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah
Judul : Persepsi Guru Bahasa Daerah Tingkat SMP Terhadap Kebijakan Pendidikan Bahasa Daerah Di Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu.

No.	NAMA DOSEN	JABATAN	TANGGAL	TANDA TANGAN
1	Dr. Ramly, M. Hum.	Pembimbing I	07/06/2017	
2	Dr. Salam, M.Pd	Pembimbing II	07/06/2017	
3	Hajrah, S.S, M.Pd.	Penguji I	07/06/2017	
4	Abd. Haliq, Pd., M.Pd	Penguji II	07/06/2017	

Makassar, 07 Juni 2017

Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia

Dr. Muhammad Saleh, S.Pd., M.Pd
NIP 19751231 200003 1 001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)

FAKULTAS BAHASA DAN SAstra

Alamat: Kampus UNM Parangtambung, Jalan Daeng Tata Raya Makassar 90224

Telepon: (0411) 861508, 861509, 861510 Faksimile: (0411) 861508

Laman: <http://fbs.unm.ac.id>

Nomor : 3877/UN36.5.1/LT/2017
Lamp. : Satu eksampul proposal
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

14 Juni 2017

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu
Belopa

Disampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu bahwa salah satu persyaratan penyelesaian studi mahasiswa Program Strata Satu (S-1), Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar adalah melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan izin penelitian pada instansi atau tempat yang dituju kepada:

Nama : lin Horryzha Hatta
NIM : 1555045035
Jurusan : Bahasa dan Sastra Indonesia
Program studi : Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah
Alamat : Desa Wiwitan Timur, Kec. Lamasi Kab. Luwu
Nomor Hp : 085397893417
Lokasi penelitian : Beberapa SMP dan Kantor Dinas Pendidikan di Kabupaten Luwu
Judul penelitian : Kebijakan Pelayanan Pendidikan Bahasa Daerah Tingkat SMP Di Kabupaten Luwu

Demikian permohonan ini, atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



n. Dekan

Membantu Dekan Bidang Akademik,

Dr. Selly, M.Hum.

MP 19590616 198601 1 002

Tembusan:

1. Ketua Jur. Bahasa dan Sastra Indonesia
2. Mahasiswa yang bersangkutan



PEMERINTAHAN KABUPATEN LUWU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
SMP NEGERI 3 LAMASI

Alamat : Jl. Pendidikan ,Desa To'lemo Kecamatan Lamasi Kab. Luwu

SURAT KETERANGAN

Nomor : 007/UPTD.08/SMP/TU 2017

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Smp Negeri 3 Lamasi menerangkan bahwa:

Nama : IIN HORRYZHA .H

Nim : 1555045035

Jurusan : Bahasa Dan Sastra Indonesia

Program Studi : Pendidikan Bahasa Dan Sastra Daerah

Judul Skripsi : "Kebijakann Pelayanan Pendidikan Bahasa Daerah Tingkat Smp Di Kabupaten Luwu"

Yang tersebut namanya diats benar telah melaksanakan penelitian di Smp Negeri 3 Lamasi.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk digunakan seperlunya.

To'lemo, 03 juli 2017





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
FAKULTAS BAHASA DAN SAstra

Kampus Parangtambung UNM Jalan Daeng Tata Makassar 90224

Telepon (0411) 861508, 861509, 861510, 863540

Jbsi.fbs.unm@gmail.com - www.jbsiumm.ac.id - www.unm.ac.id

Nomor: 957/UN36.5.2/EP/2017

3 Agustus 2017

Lamp. : satu rangkap naskah hasil penelitian

Hal : Penugasan/Undangan Seminar Hasil Penelitian

Yth.

1. Dr. Ramly, M.Hum.
2. Dr. Salam, M.Pd.
3. Hajrah, S.S., M.Pd.
4. Abul Haliq, S.Pd., M.Pd.

Makassar

Kami mengundang Saudara untuk menguji mahasiswa dari Program Pendidikan Sarjana Guru Bahasa Daerah Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah atas nama:

No.	Nama Mahasiswa Nomor Stambuk	Panitia Seminar Hasil Penelitian
1.	Iin Horryzha H 1555045035	1. Ketua/Pembimbing I : Dr. Ramly, M.Hum. 2. Sekretaris/Pembimbing II : Dr. Salam, M.Pd. 3. Penguji I : Hajrah, S.S., M.Pd. 4. Penguji II : Abul Haliq, S.Pd., M.Pd.

Yang insya Allah akan dilaksanakan pada :

hari/ tanggal : Kamis, 10 Agustus 2017

waktu : 10.00-12.00 wita

tempat : Ruang Seminar (DG 106 Lantai 1) FBS

Mengingat pentingnya Seminar Hasil Penelitian ini, diharapkan kehadiran Bapak/ Ibu/ Saudara tepat waktu.

Atas kehadiran Bapak/Ibu/Saudara, diucapkan terima kasih.

Ketua Jurusan BSI,



Dr. Muhammad Saleh, S.Pd., M.Pd.
NIP 197512312000031001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
FAKULTAS BAHASA DAN SAstra
Kampus Parangtambung UNM, Jalan Daeng Tata, Makassar, Kode Pos 90224
Telepon (0411) 861508, 861509, 861510, 863540

TANDA TERIMA UNDANGAN SEMINAR HASIL
MAHASISWA JURUSAN BAHASA DAN SAstra INDONESIA FBS UNM

Nama : IIN HOPYURA . H
NIM : 1555048035
Program Studi : Pendidikan Bahasa & Sastra Daerah
Judul : "Kebijakan pelayanan pendidikan Bahasa Daerah Tingkat SMP Di Kab. Luwu."

No	Nama Dosen	Tanggal Penerimaan	Bersedia Hadir	Tidak Bersedia Hadir	Tanda Tangan	Ket.
1.	Dr. Pandy, M. Hum	18/07/2017	✓			
2.	Dr. Salam, M. Pd	18/07/2017	✓			
3.	Hasrah, S.S., M. Pd	18/07/2017	✓			
4.	Abd. Halig, S. Pd., M. Pd	18/07/2017	✓			
5.						

Ketua Jurusan BSI,

Dr. Muhammad Saleh, S.Pd., M.Pd.
NIP 197512312000031001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
FAKULTAS BAHASA DAN SAstra

Kampus Parangtambung UNM Jalan Daeng Tata, Makassar, Kode Pos 90224
Telepon (0411) 861508, 861509, 861510, 863540
Jbsi.fbs.unm@gmail.com - www.jbsiunm.ac.id - www.unm.ac.id

SARAN PEMBIMBING/PENGUJI PADA SEMINAR HASIL PENELITIAN

Nama : Iin Horryzha Hatta
NIM : 1555045035
Program Studi : SI Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah
Judul proposal : Kebijakan Pelayanan Pendidikan Bahasa Daerah Tingkat SMP di Kabupaten Luwu

Saran-saran:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Iin Horryzha Hatta

Makassar, 20 Juli 2017
Penguji/Pembimbing

[Signature]

Catatan:

Lembar saran ini dilampirkan pada skripsi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
FAKULTAS BAHASA DAN SAstra

Kampus Parangtambung UNM Jalan Daeng Tata, Makassar, Kode Pos 90224

Telepon (0411) 861508, 861509, 861510, 863540

Jbsi.fbs.unm@gmail.com - www.jbsiunm.ac.id - www.unm.ac.id

SARAN PEMBIMBING/PENGUJI PADA SEMINAR HASIL PENELITIAN

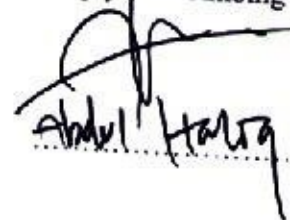
Nama : Iin Horryzha Hatta
NIM : 1555045035
Program Studi : SI Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah
Judul proposal : Kebijakan Pelayanan Pendidikan Bahasa Daerah Tingkat SMP di Kabupaten Luwu

Saran-saran:

- Konsistensi antara rumusan masalah, metode penelitian, dan hasil penelitian.
- sesuaikan antara metode yang Anda gunakan dengan analisis hasil penelitian
- pahami dulu perbedaan kuantitatif & kualitatif.

Makassar, 20 Juli 2017

Penguji Pembimbing


Abdul Haryq

Catatan:

Lembar saran ini dilampirkan pada skripsi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
FAKULTAS BAHASA DAN SAstra
Kampus Parangtambung UNM Jalan Daeng Tata Raya, Makassar, 90224
Telepon (0411) 863540, 861508, 861509, 861510 Faksimile (0411) 861508
Laman: <http://fbs.unm.ac.id>

LEMBAR PENGESAHAN
PERSETUJUAN PERBAIKAN SEMINAR HASIL PENELITIAN
MAHASISWA BAHASA DAN SAstra DAERAH

Nama : Iin Horryzha Hatta
NIM : 1555045035
Program Studi : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
Judul Skripsi : Kebijakan Pelayanan Pendidikan Bahasa Daerah Tingkat
Smp Di Kabupaten Luwu

No.	NAMA DOSEN	JABATAN	TANGGAL	TANDA TANGAN
1.	Dr. Ramli, M. Hum.	Pembimbing I	12/8/2017	
2.	Dr. Salam, M. Pd.	Pembimbing II	12/8/2017	
3.	Hajrah, S.S., M. Pd.	Penguji I	14/8/2017	
4.	Abdul Haliq, S.Pd., M.Pd.	Penguji II	14/8/2017	

Makassar, 14 Agustus 2017

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Bahasa dan Sastra Indonesia,

Dr. Muhammad Saleh, S.Pd., M.Pd.
NIP 19751231 200003 1 001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
FAKULTAS BAHASA DAN SAstra

Kampus Parangtambung UNM Jalan Daeng Tata Makassar 90224

Telepon (0411) 861508, 861509, 861510, 863540

Jbsi.fbs.unm@gmail.com - www.jbsiunm.ac.id - www.unm.ac.id

Nomor: *SLS* /UN36.5.2/EP/2017

14 Agustus 2017

Lamp : Satu Eks. Skripsi

Hal : Ujian Sarjana Lengkap (Skrpsi)

1. Dr. H. Syarifuddin Dollah, M.Pd.
2. Dr. Muhammad Saleh, S.Pd., M.Pd.
3. Dr. Ramly, M.Hum.
4. Dr. Salam, M.Pd.
5. Hajrah, S.S., M.Pd.
6. Abdul Haliq, S.Pd., M.Pd.

Makassar

Dengan hormat,

Kami mengundang Saudara untuk menguji mahasiswa dari Program Pendidikan Sarjana Guru Bahasa Daerah Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah

No.	Nama Mahasiswa/Nomor Stambuk	Panitia Ujian
1.	Iin Horryzha H 1555045043	<ol style="list-style-type: none">1. Dr. H. Syarifuddin Dollah, M.Pd.2. Dr. Muhammad Saleh, S.Pd., M.Pd.3. Dr. Ramly, M.Hum.4. Dr. Salam, M.Pd.5. Hajrah, S.S., M.Pd.6. Abdul Haliq, S.Pd., M.Pd.

Yang Insya Allah akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Jumat, 18 Agustus 2017

Waktu : 9.00 Wita-selesai

Ruangan : Ruang PPG Jurusan BSI (Gedung DG 106) FBS

Atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.



Dr. H. Syarifuddin Dollah, M.Pd.

NIP 196312311988031029

Tembusan:

1. Ketua Jurusan BSI

2. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

FAKULTAS BAHASA DAN SAstra

Kampus Parangtambung UNM, Jalan Daeng Tata, Makassar, Kode Pos 90224
Telepon (0411) 861508, 861509, 861510, 863540

**TANDA TERIMA UNDANGAN UJIAN SKRIPSI
MAHASISWA JURUSAN BAHASA DAN SAstra FBS UNM**

Nama : Iin Horryzha H
NIM : 1555045035
Program Studi : Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah
Judul : Kebijakan Pelayanan Pendidikan Bahasa Daerah Tingkat SMP di Kab. Luwu

No	Nama Dosen	Tanggal Penerimaan	Bersedia Hadir	Tidak Bersedia Hadir	Tanda Tangan	Ket.
1.	Dr. H. Syarifuddin Dollah, M.Pd.					
2.	Dr. Muhammad Saleh, S.Pd., M.Pd.					
3.	Dr. Ramly, M.Hum.					
4.	Dr. Salam, M.Pd.					
5.	Hajrah, S.S., M.Pd.					
6.	Dr. Andi Agussalim AJ., M.Hum.					

Ketua Jurusan BSI,

Dr. Muhammad Saleh, S.Pd., M.Pd.
NIP 197512312000031001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
FAKULTAS BAHASA DAN SAstra

Kampus Parangtambung UNM Jalan Daeng Tata Makassar 90224
Telepon (0411) 861508, 861509, 861510, 863540
Jbsi.fbs.unm@gmail.com - www.jbsiunm.ac.id - www.unm.ac.id


SARAN PEMBIMBING/PENGUJI PADA UJIAN LENGKAP

Nama Mahasiswa : IIN FLOPPYRHAH
NIM : 1855045035
Program Studi : Bahasa & Sastra Indonesia
Judul Penelitian : "kebiasaan PELAYANAN PENDIDIKAN TINGKAT SMP Di Kab.
Luwu"

SARAN-SARAN:

perbaiki daftar pustaka

Makassar, 18-8-2017
Penguji/Pembimbing


Roly



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

FAKULTAS BAHASA DAN SAstra

Kampus Parangtambung UNM Jalan Daeng Tata Makassar 90224

Telepon (0411) 861508, 861509, 861510, 863540

hsr fhs unu@gmail.com - www.jbsiunm.ac.id - www.unu.ac.id

SARAN PEMBIMBING/PENGUJI PADA UJIAN LENGKAP

Nama Mahasiswa : IIN HOKHYUHAH
NIM : 1855045035
Program Studi : Bahasa & Sastra Indonesia
Judul Penelitian : "kebiasaan PELAYANAN PENDIDIKAN TINGKAT SMP Di Kab. Luwu"

SARAN-SARAN:

1. Hasil yg diuraikan ad/ analisis data yg diperoleh dr
Querryor & wawancara web TV
2. Pembahasan hasil tentang Rekalasan hasil A &
Implementasi teori terhadap hasil penelitian.
3. Simpulan dr. hasil analisis data

Makassar, 18/08-2017

Penguji/Pembimbing

Haryadi, S.S., M.Pd.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

FAKULTAS BAHASA DAN SASTRA

Kampus Parangtambung UNM Jalan Daeng Tata Makassar 90224

Telepon (0411) 861508, 861509, 861510, 863540

hsr fhs unmm@gmail.com - www.fhs.unmm.ac.id - www.unmm.ac.id

SARAN PEMBIMBING/PENGUJI PADA UJIAN LENGKAP

Nama Mahasiswa : IIN HOKKUPHAH
NIM : 1855045035
Program Studi : Bahasa & Sastra Indonesia
Judul Penelitian : "kebiasaan PELAYANAN PENDIDIKAN TINGKAT SMP Di Kota Luwu"

SARAN-SARAN:

Sangat Bagus diberi nilai

Makassar,

Penguji/Pembimbing



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
FAKULTAS BAHASA DAN SAstra
Kampus Parangtambung UNM Jalan Daeng Tata Raya, Makassar, 90224
Telepon (0411) 863540, 861508, 861509, 861510 Faksimile (0411) 861508
Laman: <http://fbs.unm.ac.id>

LEMBAR PENGESAHAN
PERSETUJUAN PERBAIKAN UJIAN SARJANA LENGKAP (SKRIPSI)
MAHASISWA BAHASA DAN SAstra DAERAH

Nama : Iin Horryzha Hatta
NIM : 1555045035
Program Studi : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
Judul Skripsi : Kebijakan Pelayanan Pendidikan Bahasa Daerah Tingkat
Smp Di Kabupaten Luwu

No.	NAMA DOSEN	JABATAN	TANGGAL	TANDA TANGAN
1.	Dr. Ramli, M. Hum.	Pembimbing I	21-08-2017	
2.	Dr. Salam, M. Pd.	Pembimbing II	21-08-2017	
3.	Hajrah, S.S., M. Pd.	Penguji I	21-08-2017	
4.	Dr. Andi Agussalim AJ., M.Hum.	Penguji II	21-08-2017	

Makassar, 21 Agustus 2017

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Bahasa dan Sastra Indonesia,

Dr. Muhammad Saleh, S.Pd., M.Pd.
NIP 19751231 200003 1 001